



LAPORAN

KOMPREHENSIF PENGAWASAN

BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Segala puji hanya milik Allah dan atas limpahan karunia-Nya, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah dapat menyelesaikan Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Tentu, pencapaian Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 ini adalah berkat kolaborasi bersama dengan Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang telah menghadirkan kinerja yang maksimal dalam melakukan pengawasan dan kerjasama antar lembaga dengan membangun sinergi yang baik dengan berbagai pihak.

Sepanjang tahun 2021 ini Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah mengawal proses penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) agar berjalan sesuai dengan prinsip penyelenggaraannya, yaitu komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel dan perlindungan data pribadi. Sejalan dengan prinsip tersebut, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat juga melakukan uji petik terhadap pelaksanaan penetapan DPB oleh KPU Kabupaten/Kota guna menguji validitas data pemilih dan penyajian data pemilih yang faktual. Hasilnya, disampaikan Saran Perbaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang ditujukan untuk perbaikan DPB di 27 Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, pelaksanaan Kaderisasi Pengawasan Partisipatif Tahun 2021 di provinsi Jawa Barat juga telah mengalami pencapaian yang menggembirakan. Hal tersebut ditandai dengan antusiasme partisipasi masyarakat Jawa Barat dalam perhelatan demokrasi yang tinggi. Meskipun prosesnya diselenggarakan di tengah pandemi covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada kondisi level tinggi (level 3 dan level 4) hampir di seluruh wilayah provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat meyakinkan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi tuan rumah pelaksanaan SKPP Dasar dan SKPP Menengah Tahun 2021 dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, sehingga aman tidak menimbulkan penderita positif baru dari kegiatan tersebut.

Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan Pemilu yang membutuhkan dukungan banyak pihak, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota

se-Jawa Barat telah berupaya membangun kerjasama antar lembaga dengan berbagai lembaga dan elemen masyarakat. Dengan kerjasama antar Lembaga diharapkan menghadirkan ruang bersama dalam mengedukasi masyarakat, serta meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat.

Pada kesempatan ini, saya atas nama Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga menghaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya pengawasan dan hubungan antar Lembaga, serta penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat ini tidak luput dari kekurangan. Untuk itu, kami terbuka terhadap saran perbaikan bagi kesempurnaan penyusunan laporan ini.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Bandung, 24 Desember 2021

Anggota Bawaslu Jawa Barat/

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal



ZAKI HILMI

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | V |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Gambaran Umum | 1 |
| B. Tujuan Laporan | 2 |
| C. Landasan Umum | 2 |
| D. Sistematika Laporan | 2 |
| BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN | 4 |
| A. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Jawa Barat | 4 |
| B. Hasil Pengawasan Rekapitulasi DPB di Jawa Barat | 6 |
| C. Pembinaan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) | 15 |
| BAB III PELAKSANAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF | 16 |
| A. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Dasar | 16 |
| B. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Menengah | 32 |
| C. Pencanaan Kampung Pengawasan Partisipatif | 46 |
| D. Sosialisasi Pendidikan Pengawasan di Lingkungan Akademik | 49 |
| E. Webinar Pojok Pengawasan | 51 |
| F. Podcast Pandangan Demokrasi Milenial (PANDEMI) | 53 |
| G. Tadarus Pengawasan | 53 |
| H. Kerja sama Pengawasan Partisipatif | 54 |
| I. Optimalisasi dan Integrasi Hubungan Antar Lembaga | 56 |
| J. Konsolidasi Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Dasar dan Menengah Tahun 2021 | 56 |
| BAB IV PENUTUP | 58 |
| A. KESIMPULAN | 58 |
| B. REKOMENDASI | 58 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Hak memilih adalah bagian dari hak asasi manusia dan merupakan bagian penting dari prinsip kedaulatan rakyat yang tercermin dalam prinsip demokrasi dan menjadi landasan utama dalam bernegara yang dituangkan dalam konstitusi. Tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat adalah penghargaan dan penilaian terhadap hak rakyat untuk memilih dan menentukan arah kehidupan kenegaraan yang dapat menjamin kesejahteraan bersama.

Oleh karena itu, prinsip itulah yang menjadi inti dari demokrasi yang berintegritas. Kunci untuk membangun demokrasi yang berintegritas adalah penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas (*election with integrity*), yaitu bukan sekadar Pemilu yang bersifat formalistik dan prosedural formal, tetapi Pemilu yang diselenggarakan secara demokratis, adil dan bermartabat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pentingnya hak memilih dan pengaturannya dalam Pemilu.

Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota tentu berpedoman pada standar tata laksana pengawasan yang telah disusun oleh Bawaslu. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan dan menjaga kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan, maka Bawaslu perlu untuk melakukan pengawasan sejak dini pada setiap proses pemutakhiran data dan daftar pemilih berkelanjutan.

Kewajiban pengawasan DPB termaktub dalam Pasal 100 huruf (e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bagi Bawaslu Provinsi, dan Pasal 104 huruf (e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bagi Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban pengawasan serta menjaga kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan sejak dini pada setiap proses pemutakhiran data dan daftar pemilih berkelanjutan.

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih seperti menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar di daftar pemilih, mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, dan memperbaharui elemen data pemilih secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut penting dilakukan guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya (DPB menjadi DP4 Pemilu berikutnya). Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan dilakukan berdasarkan prinsip

komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, transparan, responsif dan partisipatif. Dengan penyusunan DPB diharapkan seluruh data pemilih terkonsolidasi, pemutakhiran tidak dilaksanakan saat tahapan Pemilu, serta potensi manipulasi data pemilih dapat kita cegah sejak dini.

B. TUJUAN LAPORAN

1. Menyajikan data hasil pengawasan sebagai pertanggungjawaban kinerja pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
2. Menyajikan informasi yang penting dan berguna bagi masyarakat maupun akademisi untuk kepentingan riset kepemiluan.
3. Melaporkan kegiatan prioritas nasional “Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan Gambaran Umum, Tujuan Laporan, Landasan Hukum dan Sistematika Laporan.

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tahun 2021.
2. Hasil Pengawasan Evaluasi DPB di Jawa Barat.
3. Pembinaan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB)

BAB III PELAKSANAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Bab ini menjelaskan kegiatan yang telah dilaksanakan baik program prioritas nasional maupun non prioritas nasional. Program prioritas nasional terdiri dari :

1. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Dasar;
2. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Menengah;
3. Pencanaan Kampung Pengawasan Partisipatif;
4. Sosialisasi Pendidikan Pengawasan di Lingkungan Akademik;

5. Webinar Pojok Pengawasan;

sedangkan kegiatan yang bukan prioritas nasional yang telah dilaksanakan terdiri dari :

1. Podcast Pandangan Demokrasi Milenila (PANDEMI);
2. Tadarus Pengawasan Pemilu;
3. Kerjasama Pengawasan Partisipatif ;
4. Optimalisasi dan Integrasi Hubungan Antar Lembaga;
5. Konsolidasi Kader SKPP Dasar dan Menengah Tahun 2021.

BAB IV PENUTUP

Bab ini akan menyajikan Kesimpulan dan Rekomendasi berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN

A. PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT PROVINSI

Tugas Bawaslu Provinsi sebagaimana ketentuan Pasal 100 huruf (e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas pengawasannya melakukan dua kegiatan, yaitu :

a. Kerawanan-Kerawanan

1. Potensi manipulasi daftar pemilih
2. Akses data bagi Pengawasan Pemilu belum diberikan
3. Sumber data berasal dari berbagai instansi belum akurat
4. Perekaman KTP-el belum 100% diselesaikan di Jawa Barat
5. Data Pemilih tidak tersaji secara *real time*

b. Aktifitas Pencegahan dalam Pengawasan DPB

Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan Rapat Teknis “Mengkaji Penerapan Uji Petik dalam Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan” pada tanggal 21 Oktober 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut bertujuan:

- 1) Merumuskan metode pelaksanaan uji petik pengawasan daftar pemilih berkelanjutan;
- 2) Mempersiapkan instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaan uji petik pengawasan daftar pemilih berkelanjutan;
- 3) Melaksanakan proses uji petik terhadap data pemilih berkelanjutan di Kabupaten/Kota;
- 4) Menjaring informasi dan kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten/Kota terkait pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

Kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengawasan DPB tersebut diikuti oleh 54 orang Bawaslu Kabupaten/Kota yang terdiri dari: 27 orang Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal, dan 27 orang Staf Pengawasan dan Hubal.

Kegiatan tersebut mengundang narasumber dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan materi: “Metode Sensus dalam Pemutakhiran Data Kependudukan”, Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat dengan materi: “Catatan Evaluatif Pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan di Jawa Barat Tahun 2021”, serta Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat memberikan pengarahan teknis pengawasan DPB.

Dalam melaksanakan fungsi pembinaan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring dan supervisi pengawasan pemutakhiran DPB selama tahun 2021 ini sebanyak 2 kali, yaitu:

- 1) Tanggal 4 s.d 5 Mei 2021 telah dilaksanakan monitoring dan supervisi pengawasan pemutakhiran DPB ke 6 (enam) Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar.
- 2) Tanggal 27 s.d 29 Mei 2021 telah dilaksanakan monitoring dan supervisi pengawasan pemutakhiran DPB ke 12 (dua belas) Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Depok, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Majalengka.

Melalui kegiatan monitoring dan supervisi, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi dengan pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;
- 2) Memeriksa kelengkapan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten/Kota untuk proses pengawasan pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
- 3) Memeriksa kelengkapan alat kerja pengawasan penyusunan Daftar Pemilih berkelanjutan dan memastikan dilaporkan secara berkala;
- 4) Menganalisis potensi kerawanan yang ada pada proses pengawasan penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
- 5) Menghimpun kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 6) Mencatatkan hasil pengawasan kedalam instrumen supervisi dan Form A pengawasan.
- 7) Pelaksana tugas supervisi Bawaslu Provinsi Jawa Barat melaporkan secara cepat perkembangan hasil supervisi kepada pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat melalui media grup WA yang telah tersedia.

c. Aktifitas Pengawasan Pemutakhiran DPB

Pada Tahun 2021, KPU Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan proses pemutakhiran DPB selama satu kali, yaitu Triwulan 1. Ada mekanisme baru pemutakhiran DPB sesuai SE 366 dilaksanakan perbulan, dengan stakeholder dilaksanakan per semester. Bukan hanya Berita Acara dan Salinan Hasil Rekapitulasi DPB yang diberikan ke *stakeholder*, tapi mengumumkan DPB di tempat strategis dan media lokal. KPU Provinsi Jawa Barat juga meluncurkan satu layanan DPB. Di sesi ini mulai pembacaan rekapitulasi akumulasi bulan januari hingga juni, hanya menambahkan per 6 bulan, sebelumnya per bulan.

Adapun basis data dalam penyusunan DPB menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Serentak Tahun 2020, dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan Umum Tahun 2019. Kerja pengawasan telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota, Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, Pengadilan Negeri setempat dan mengawasi rekapitulasi DPB di tingkat Kabupaten/Kota.

Koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan untuk mendapatkan informasi data penduduk yang telah melakukan perekaman KTP elektronik dan data yang telah meninggal dunia, beralih status dari penduduk sipil menjadi anggota TNI/Polri dan sebaliknya, beralih status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA, penduduk yang belum berusia 17 tahun namun sudah menikah, serta penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan nama/alamat domisili. Koordinasi juga dilakukan dengan Pengadilan Negeri setempat untuk mengecek pemilih yang dicabut hak pilihnya di Kabupaten/Kota tersebut.

Kemudian, satu metode yang terakhir diamanatkan oleh Bawaslu dalam Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor: 13 Tahun 2021 bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota diinstruksikan melakukan uji petik sebelum melaksanakan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi dengan cara memeriksa dan melakukan audit di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota untuk mendapatkan informasi pemilih keluar/masuk wilayah/pindah domisili, pemilih meninggal dunia, dan pemilih yang beralih status menjadi TNI/Polri dan/atau pensiunan TNI/Polri.

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 ini adalah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Rapat Koordinasi Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Provinsi Jawa Barat Triwulan 1 yang dilaksanakan tanggal 20 April 2021, dan Rapat Koordinasi Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Provinsi Jawa Barat Triwulan 2 dilaksanakan tanggal 5 Agustus 2021.

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat dilakukan secara virtual dengan mengundang Bawaslu Provinsi Jawa Barat, pimpinan partai politik tingkat Jawa Barat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat, Kodam III Siliwangi serta media massa cetak dan elektronik serta online di Jawa Barat.

B. HASIL PENGAWASAN REKAPITULASI DPB DI JAWA BARAT

Selama periode Triwulan 1 (Januari s.d Maret) Tahun 2021, hanya Kabupaten Cianjur yang telah melakukan rekapitulasi DPB, dan masih terdapat 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Serentak Tahun 2020, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Depok belum melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan hingga akhir Triwulan 1 sebagaimana perintah SE KPU RI Nomor 218/PL.02-SD/01/KPU/III/2021 perihal pengambilan data untuk keperluan evaluasi Pemilihan Serentak Tahun 2020

yang memberikan waktu hingga tanggal 30 April 2021 untuk melakukan input data DPTb kedalam SIDALIH;

Akhirnya, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Plt. Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

REKAPITULASI DPB TAHUN 2021 TRIWULAN 1

| NO | KABUPATEN / KOTA | PEMILIH BARU | TMS | PERBAIKAN DATA PEMILIH | JUMLAH PEMILIH BERKELANJUTAN | | |
|----|-------------------------|--------------|--------|------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | L | P | L + P |
| 1 | KABUPATEN BOGOR | 4.186 | 7.140 | 162 | 1.785.654 | 1.703.807 | 3.489.461 |
| 2 | KABUPATEN GARUT | 615 | 1.205 | 45 | 965.191 | 933.600 | 1.898.791 |
| 3 | KABUPATEN CIAMIS | 1.408 | 575 | 213 | 474.193 | 474.193 | 942.975 |
| 4 | KABUPATEN KUNINGAN | 4.678 | 2.955 | | 432.951 | 427.104 | 860.055 |
| 5 | KABUPATEN CIREBON | 1.535 | 1.484 | | 849.874 | 838.798 | 1.688.672 |
| 6 | KABUPATEN MAJALENGKA | 6.034 | 2.389 | | 497.504 | 505.343 | 1.002.847 |
| 7 | KABUPATEN SUMEDANG | 213 | 3.818 | 505 | 428.122 | 431.074 | 859.196 |
| 8 | KABUPATEN SUBANG | 3.229 | 1.102 | | 582.159 | 597.395 | 1.179.554 |
| 9 | KABUPATEN PURWAKARTA | 13.630 | 1.187 | | 356.110 | 353.922 | 710.032 |
| 10 | KABUPATEN BEKASI | 662 | 801 | | 1.017.736 | 1.017.354 | 2.035.090 |
| 11 | KABUPATEN BANDUNG BARAT | 783 | | | 607.882 | 599.494 | 1.207.376 |
| 12 | KOTA BOGOR | 4.305 | 2.140 | | 370.529 | 371.691 | 742.220 |
| 13 | KOTA SUKABUMI | 3.547 | 1.667 | 107 | 117.256 | 119.335 | 236.591 |
| 14 | KOTA BANDUNG | 23.363 | 16.307 | 884 | 878.770 | 888.086 | 1.766.856 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|---------------|---------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 15 | KOTA CIREBON | 1.521 | 210 | | 121.449 | 124.162 | 245.611 |
| 16 | KOTA BEKASI | 589 | 2.874 | | 835.786 | 844.692 | 1.680.478 |
| 17 | KOTA CIMAH | 1.513 | 118 | | 190.190 | 194.523 | 384.713 |
| 18 | KOTA TASIKMALAYA | 1.014 | 4.130 | 86 | 242.573 | 241.370 | 483.943 |
| 19 | KOTA BANJAR | 169 | 168 | 20 | 72.572 | 74.484 | 147.056 |
| 20 | KOTA DEPOK | | | | | | |
| 21 | KABUPATEN PANGANDARAN | | | | | | |
| 22 | KABUPATEN TASIKMALAYA | | | | | | |
| 23 | KABUPATEN BANDUNG | | | | | | |
| 24 | KABUPATEN CIANJUR | | | | | | |
| 25 | KABUPATEN KARAWANG | | | | | | |
| 26 | KABUPATEN INDRAMAYU | | | | | | |
| 27 | KABUPATEN SUKABUMI | | | | | | |
| | | 72.994 | 50.270 | | 32.351.314 | 10.821.090 | 21.561.517 |

Sumber : BA KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 76/PL.02.01-BA/32/Prov/IV/2021 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021
Periode Triwulan 1

REKAPITULASI DPB TAHUN 2021 TRIWULAN 2

| | KABUPATEN / KOTA | PEMILIH BARU | TMS | JUMLAH PEMILIH PINDAH MASUK | JUMLAH PEMILIH PINDAH KELUAR | JUMLAH PEMILIH BULAN BERJALAN | JUMLAH PEMILIH BERKELANJUTAN | | |
|----|-------------------------|--------------|-------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | L | P | L + P |
| 1 | KABUPATEN BOGOR | 699 | 741 | 40 | 24 | 3.489.048 | 1.785.063 | 1.703.985 | 3.489.048 |
| 2 | KABUPATEN GARUT | 308 | 27 | 0 | 0 | 1.899.097 | 965.291 | 933.806 | 1.899.097 |
| 3 | KABUPATEN CIAMIS | 398 | 77 | 0 | 42 | 944.072 | 469.314 | 474.758 | 944.072 |
| 4 | KABUPATEN KUNINGAN | 2.439 | 1.050 | 780 | 951 | 864.994 | 435.428 | 429.566 | 864.994 |
| 5 | KABUPATEN CIREBON | 5.322 | 773 | 0 | 0 | 1.693.152 | 852.823 | 840.329 | 1.693.152 |
| 6 | KABUPATEN MAJALENGKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.154 | 509.052 | 1.010.206 |
| 7 | KABUPATEN SUMEDANG | 157 | 332 | 113 | 113 | 858.300 | 427.662 | 430.638 | 858.300 |
| 8 | KABUPATEN SUBANG | 480 | 405 | 152 | 144 | 1.181.555 | 583.129 | 598.426 | 1.181.555 |
| 9 | KABUPATEN PURWAKARTA | 1.858 | 254 | 0 | 208 | 716.283 | 359.333 | 356.950 | 716.283 |
| 10 | KABUPATEN BEKASI | 609 | 266 | 0 | 266 | 2.036.711 | 1.018.555 | 1.018.156 | 2.036.711 |
| 11 | KABUPATEN BANDUNG BARAT | 642 | 28 | 0 | 12 | 1.208.217 | 608.383 | 599.888 | 1.208.271 |
| 12 | KOTA BOGOR | 1.224 | 574 | 0 | 0 | 744.346 | 371.438 | 372.908 | 744.346 |
| 13 | KOTA SUKABUMI | 599 | 382 | 44 | 263 | 237.567 | 117.727 | 119.840 | 237.567 |
| 14 | KOTA BANDUNG | 5.411 | 1.682 | 1.044 | 1.245 | 1.778.613 | 884.810 | 893.803 | 1.778.613 |
| 15 | KOTA CIREBON | 0 | 33 | 0 | 0 | 246.759 | 122.025 | 124.734 | 246.759 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 16 | KOTA BEKASI | 136 | 128 | 0 | 0 | 1.679.656 | 835.612 | 844.044 | 1.679.656 |
| 17 | KOTA CIMAHI | 103 | 0 | 0 | 0 | 385.433 | 190.409 | 195.024 | 385.433 |
| 18 | KOTA TASIKMALAYA | 75 | 18 | 2 | 3 | 485.089 | 243.047 | 242.042 | 485.089 |
| 19 | KOTA BANJAR | 87 | 89 | 87 | 26 | 147.067 | 72.553 | 74.514 | 147.067 |
| 20 | KOTA DEPOK | 78 | 328 | 0 | 0 | 1.235.232 | 608.677 | 626.555 | 1.235.232 |
| 21 | KABUPATEN PANGANDARAN | 11 | 127 | 1 | 0 | 320.813 | 159.230 | 161.583 | 320.813 |
| 22 | KABUPATEN TASIKMALAYA | 100 | 212 | 0 | 0 | 1.338.548 | 675.790 | 662.758 | 1.338.548 |
| 23 | KABUPATEN BANDUNG | 0 | 2.890 | 0 | 48 | 2.361.519 | 1.191.787 | 1.169.732 | 2.361.519 |
| 24 | KABUPATEN CIANJUR | 26 | 86 | 0 | 0 | 1647589 | 837.343 | 810.246 | 1.647.589 |
| 25 | KABUPATEN KARAWANG | 2.514 | 514 | 67 | 634 | 1.659.488 | 831.215 | 828.273 | 1.659.488 |
| 26 | KABUPATEN INDRAMAYU | 0 | 101 | 0 | 0 | 1.314.990 | 655.222 | 659.768 | 1.314.990 |
| 27 | KABUPATEN SUKABUMI | 5.665 | 393 | 5.986 | 589 | 1.877.176 | 951.131 | 926.831 | 1.877.176 |
| | | 28.941 | 11.510 | 8.316 | 4.568 | 32.351.314 | 16.754.151 | 16.608.209 | 33.361.574 |

Sumber: BA KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 148/PL.02.01-BA/32/Prov/VIII/2021 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Triwulan 2

a. Temuan

Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mengidentifikasi sedikitnya 7 (tujuh) permasalahan yang ditemukan dalam penyusunan DPB, yaitu :

1. Terdapat ketidakseragaman proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada beberapa kabupaten/kota, dimana siklus pencermatan data dilakukan pada bulan sebelumnya dan rekapitulasi dilakukan pada bulan setelahnya. Sementara, pada kabupaten/kota lainnya melakukan pencermatan dan rekapitulasi pada bulan yang sama;
2. Bahwa dalam satuan kecamatan masih ditemukan data pemilih yang tidak bergerak mengalami perubahan di Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa masih terdapat kabupaten/kota yang belum memasukan data DPK Pemilu 2019 secara keseluruhan kedalam Daftar Pemilih Berkelanjutan yang seharusnya sudah diinput di Kabupaten Majalengka;
4. Bahwa KPU Kabupaten/Kota ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara berkala dengan TNI/Polri setempat. Tetapi hasil koordinasi tidak menghasilkan data pensiunan TNI/Polri yang memuat elemen data pemilih secara lengkap, sehingga memerlukan upaya pencermatan kembali oleh KPU kabupaten/kota;
5. KPU kabupaten/kota belum mensinergikan secara valid data DPB dengan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
6. Bahwa KPU kabupaten/kota ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara berkala untuk memperoleh data pemilih dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dinas yang mengurus kematian/pemakaman, dan/atau dinas terkait lainnya. Tetapi hasil koordinasi KPU kabupaten/kota tidak menghasilkan data *by name by address* rincian perubahan pemilih, tetapi hanya diberikan rekap data pemilih baru, rekap data pemilih yang mengalami perubahan data, dan rekap data penduduk yang masuk kedalam pemilih TMS oleh Disdukcapil kabupaten/kota. Sementara, data pemilih TMS yang telah meninggal dunia belum dapat dihapus oleh KPU kabupaten/kota jika belum mengurus surat keterangan kematian ke pemerintah setempat; dan
7. Masih terdapat kabupaten/kota yang menyisakan persoalan pemilih belum memiliki e-KTP dan/atau sudah melakukan perekaman.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di provinsi Jawa Barat disampaikan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, Bawaslu kabupaten/kota di wilayah provinsi Jawa Barat masih dihadapkan pada permasalahan tertutupnya akses data kependudukan (*by name by address*) dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) di 19 Kabupaten/Kota, yaitu : Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bekasi, Kabupaten

Sumedang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kota Bekasi, Kota Cirebon, dan Kota Cimahi. Dengan tidak diberikan data pemilih *by name by address* menyebabkan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak dapat memastikan validitas data DPB, memastikan kelengkapan instrumen DPB (NKK, NIK, Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Status Perkawinan, Jenis Kelamin, Alamat dan Keterangan Disabilitas) dan tidak dapat membuat analisa hasil pengawasan DPB, sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi kualitas pengawasan DPB;

2. Bahwa tingkat perkembangan penularan Covid-19 di wilayah Provinsi Jawa Barat pada periode bulan Juni 2021 jumlahnya semakin meningkat, sehingga berdampak pada tingginya jumlah pemilih yang harus dicoret dari daftar pemilih dikarenakan meninggal dunia akibat Covid-19;
3. Bahwa dalam proses pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan di Kabupaten Majalengka masih ditemukan data pemilih yang belum dimutakhirkan sebanyak 17 orang, dengan rincian: meninggal dunia sebanyak 9 orang terdiri dari laki-laki 3 orang dan perempuan 6 orang, pindah domisili sebanyak 4 orang terdiri dari laki-laki 2 orang dan perempuan 2 orang, serta pemilih datang sebanyak 4 orang terdiri dari laki-laki 3 orang dan perempuan 1 orang di Kecamatan Cigasong dan Kecamatan Maja (data terlampir);
4. Bahwa terdapat 5 kabupaten/kota (Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Ciamis, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya) yang telah menyampaikan Rekomendasi terkait Daftar Pemilih Berkelanjutan periode Juni 2021 sebagai Saran Perbaikan.

b. Saran Perbaikan

Saran Perbaikan pada Rakor Rekapitulasi DPB Triwulan 1 tanggal 20 April 2021

Bawaslu Kabupaten/Kota fokus melakukan pengawasan dalam input data DPTb Pemilihan Serentak Tahun 2020 serta DPK Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan memperhatikan pada penghapusan data ganda, penghapusan pemilih Tidak Memenuhi Syarat dan penambahan pemilih yang Memenuhi Syarat. Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan fungsi pengawasan penyusunan DPB di tingkat Provinsi melalui kegiatan Supervisi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 ke seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi Jawa Barat. Pada rapat koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 periode Triwulan 1, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan pengawasan langsung dan menyampaikan saran perbaikan secara tertulis sehubungan ditemukannya beberapa permasalahan yang belum

sepenuhnya ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota. Saran perbaikan tersebut disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat melalui surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 064/PM.00.01/K.JB/04/2021 tertanggal 20 April 2021.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan saran perbaikan sebagai berikut :

1. Dalam proses penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan perlu menerapkan keseragaman waktu penetapan pemilih (rekapitulasi DPB) di 27 Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Jawa Barat;
2. Mendorong KPU Kabupaten Bekasi perlu meningkatkan koordinasi aktif pada wilayah Kecamatan yang tidak mengalami perubahan data pemilih dalam penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
3. Meminta KPU Kabupaten Majalengka untuk menginput kembali data DPK Pemilu 2019 kedalam DPB;
4. Mendorong KPU kabupaten/kota bersinergi dengan lembaga TNI/Polri di tingkat kabupaten/kota guna memberikan data pensiunan TNI/Polri dilengkapi dokumen kependudukan berupa KTP/KK;
5. KPU kabupaten/kota perlu mensinkronkan kembali data hasil pemutakhiran DPB kedalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);,
6. Bawaslu kabupaten/kota bersama KPU kabupaten/kota sebagai lembaga yang hadir atas mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mendorong Disdukcapil kabupaten/kota memberikan akses data *by name by address* mengenai pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan data pribadi penduduk dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan;
7. Mengoptimalkan pelayanan terhadap pemilih yang belum memiliki e-KTP dan/atau sudah melakukan perekaman dengan mendorong kerja sinergis Disdukcapil kabupaten/kota, KPU kabupaten/kota dan Bawaslu kabupaten/kota.

Saran Perbaikan pada Rakor Rekapitulasi DPB Triwulan 2 tanggal 5 Agustus 2021

Selanjutnya, atas beberapa permasalahan yang dikemukakan di atas, kami sampaikan Saran Perbaikan sebagai berikut :

1. Mendorong KPU Provinsi Jawa Barat agar melakukan koordinasi kepada KPU RI guna mengupayakan pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan diberikan melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia agar kiranya dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi;
2. Mendorong KPU Provinsi Jawa Barat agar melakukan koordinasi dengan Satgas Covid-19 Provinsi Jawa Barat guna sinkronisasi data yang meninggal dunia akibat Covid-19;

3. Meminta KPU Provinsi Jawa Barat untuk mencermati data pemilih yang belum dimutakhirkan seperti di Kabupaten Majalengka sebagaimana terlampir agar segera didaftar dalam DPB pada periode Juli 2021;
4. Mendorong KPU Provinsi Jawa Barat agar memerintahkan 5 Kabupaten/Kota dimaksud untuk menindaklanjuti hal tersebut dan menuangkannya dengan tidak terpisahkan kedalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi DPB.

C. Pembinaan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB)

1. Rapat Teknis Mengkaji Penerapan Uji Petik Dalam Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan

Kegiatan rapat teknis mengkaji penerapan uji petik dalam pengawasan daftar pemilih berkelanjutan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2021 bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada pukul 08.00 wib dengan mengundang Koordinator Divisi PHL dan Staf PHL se-Provinsi Jawa Barat. Narasumber yang diundang pada kegiatan tersebut adalah Bapak Buldansah, Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan Ibu Titik Nurhayati, Anggota KPU Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk melaksanakan fungsi dan tugas Bawaslu dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang menjadi satu-satunya amanat undang-undang yang mewajibkan kita melakukan pengawasan di luar tahapan. beberapa Bawaslu kab/kota sudah melakukan uji petik sebagai penerjemahan SE Bawaslu RI. Maka, kegiatan ini bermaksud agar adanya formulasi yang dihasilkan, melakukan pemetaan dan menemukan solusi atas kendala dimana tidak diberikan akses data pada rapat koordinasi DPB.

2. Rapat Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan

Selain melaksanakan Rapat Koordinasi Mengkaji Penerapan Uji Petik, Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga melaksanakan Rapat Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2021 pada pukul 09.00 wib bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan mengundang Koordinator Divisi PHL dan Staf PHL.se-Jawa Barat. Adapun narasumber yang diundang adalah Bapak Ferdhiman Bariguna yang merupakan Penasehat Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi pengawasan pemilu di Jawa Barat.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

A. SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF (SKPP) DASAR

3.1 Persiapan Kegiatan

Persiapan pelaksanaan SKPP Dasar di Provinsi Jawa Barat:

- a. Rapat Internal Bagian PHL yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2021 (pra rekrutmen);
- b. *zoom meeting* bersama Bawaslu RI terkait mapping peserta dan titik lokasi yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2021;
- c. Bimtek ToT Fasilitator yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI dan dihadiri oleh Koordiv. PHL Jawa Barat dan disiarkan melalui *zoom meeting* pada tanggal 4 Juni 2021;
- d. Rapat Koordinasi Persiapan SKPP Dasar pada tanggal 6 Juni 2021 yang dihadiri oleh TA Bawaslu RI, Masykuruddin Hafidz dengan melibatkan 27 Bawaslu Kab/Kota yang terdiri dari Ketua, Kordiv. PHL dan Koordinator Sekretariat di Kabupaten Garut;
- e. Bimtek ToT Fasilitator Bagi Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 15 Juni 2021 untuk meningkatkan kapasitas calon fasilitator dalam pengelolaan forum SKPP Dasar yang diikuti oleh Ketua, Koordiv. PHL, Koordinator Sekretariat dan Staf PHL bertempat di Patra Cirebon Convention & Hotel.
- f. Rapat bersama 14 kab/kota melalui *zoom meeting* pada tanggal 18 Juni terkait *update* masing-masing daerah pada situasi covid-19 untuk memungkinkan pelaksanaan. Hal tersebut dilaksanakan agar SKPP tidak menjadi cluster baru covid-19.

3.2 Proses Pendaftaran Kader

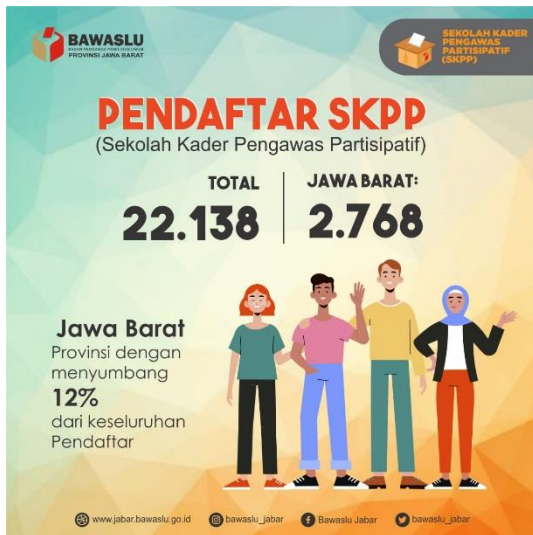
Pelaksanaan Pendaftaran/Rekrutmen dilaksanakan langsung melalui sistem Bawaslu RI namun proses sosialisasi dilaksanakan di semua tingkatan. Informasi pendaftaran gencar di sosialisasikan melalui rapat-rapat lintas divisi, melalui media sosial seperti Instagram dan twitter Bawaslu provinsi maupun Bawaslu Kab/Kota. Masa pendaftaran SKPP Dasar dilaksanakan pada tanggal 24-28 Mei 2021. Pendaftaran langsung dengan *tap on mobile* di laman: <https://skpp.bawaslu.go.id/registrasi/>. Adapun persyaratan peserta sebagai berikut:

1. Usia minimal 20 tahun maksimal 30 tahun;
2. Pendidikan minimal SMA atau sederajat;
3. Diutamakan berpengalaman atau sedang menjadi pengurus organisasi atau komunitas;
4. Tidak pernah menjadi anggota atau pengurus Partai Politik;

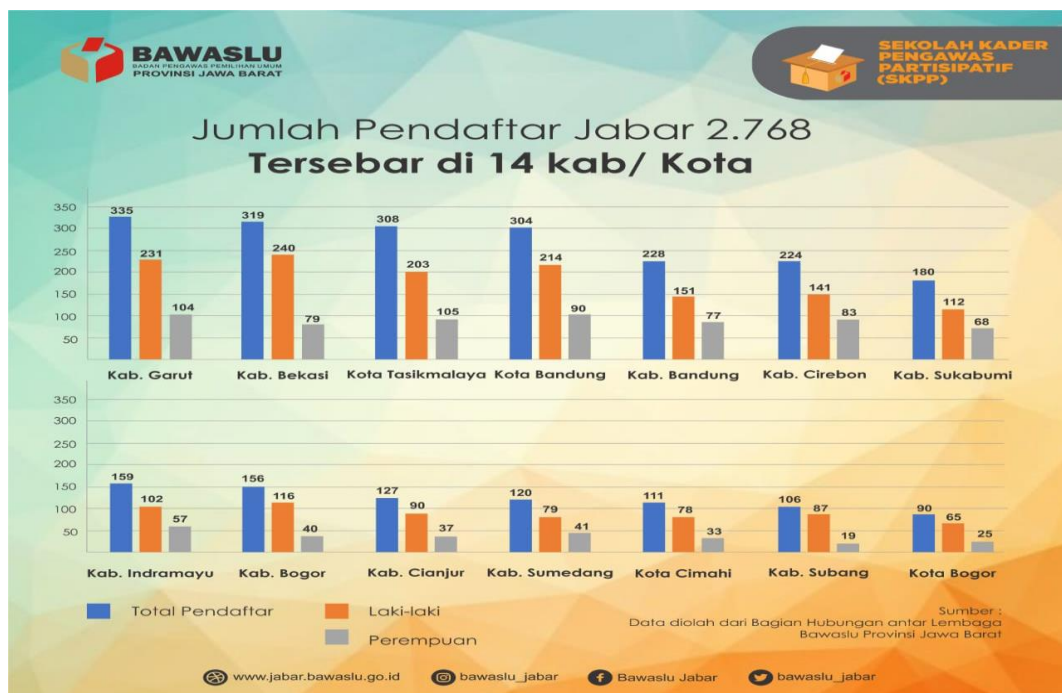
5. Belum pernah mengikuti SKPP secara luar jaringan;
6. Belum pernah menjadi penyelenggara pemilu/pemilihan adhoc;
7. Belum pernah atau sedang menjadi staf di lingkungan penyelenggara pemilu;
8. Tidak pernah dan tidak sedang menjadi tim kampanye atau tim sukses pasangan calon tertentu;
9. Mendapatkan izin dari instansi untuk mengikuti program pendidikan sampai selesai (bagi yang bekerja);
10. Bersedia untuk mengikuti pendidikan sampai selesai;
11. Tidak pernah atau sedang terlibat dalam kasus hukum;
12. Sehat Jasmani, Rohani dan Bebas dari Narkoba;
13. Afirmasi pendaftar bagi perempuan, disabilitas dan kelompok rentan;
14. Beralamat dan/atau berdomisili di Kab/kota berikut ini: daftarkab/kota;
15. Melakukan pendaftaran online di skpp.bawaslu.go.id/registrasi;



Berdasarkan hasil pendaftaran terdapat 2.768 pendaftar di Jawa Barat yang membuat Jawa Barat menjadi penyumbang sebanyak 12% dari keseluruhan pendaftar. Di Indonesia yang sebanyak 22.138. Jawa Barat menjadi Provinsi dengan pendaftar SKPP terbanyak.



Jumlah pendaftar laki-laki di 14 Kab/Kota sebanyak 1.910 (69,4%) dan jumlah pendaftar perempuan sebanyak 858 (30,6%), sudah memenuhi keterwakilan perempuan. Untuk rincian di 14 Kab/Kota dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



3.3 Seleksi

Proses seleksi berlangsung melalui 2 (dua) tahapan yaitu: penyerahan berkas melalui upload ke laman <https://skpp.bawaslu.go.id/registrasi>. Kemudian selanjutnya poses penelitian berkas oleh Bawaslu Kab/Kota terpilih di 14 Kab/Kota berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan Bawaslu RI dan mengirimkan hasil skrining/ penelitian administrasi kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 12 Juni 2021. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan kepada Bawaslu RI pada tanggal 13 Juni 2021. Calon Peserta yang dinyatakan lulus administrasi kemudian ditetapkan sebagai peserta (anak didik) Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Latar belakang peserta yang mendaftarkan sekolah kader pengawas partisipatif yang di

Jawa Barat sangat beragam dari mulai organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, dan lembaga pemantau, *freshgraduate*, *freelance* sampai professional.

Dari sebanyak 2.768 pendaftar terseleksi menjadi 630 orang yang dibagi ke dalam 7 titik pelaksanaan SKPP Dasar. Sebanyak 630 peserta yang lolos dengan rincian laki-laki sebanyak 407 orang (65%) dan perempuan sebanyak 223 orang (35%).



Adapun keterwakilan perempuan dalam setiap titik lokasi dapat dilihat secara rinci dibawah ini :



Peserta yang dinyatakan lolos untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran SKPP Dasar disyaratkan untuk:

- a) Melakukan tes usap/swab antigen yang disiapkan oleh panitia;
- b) Peserta di haruskan untuk mempersiapkan diri dan menjaga kesehatan dengan berperilaku hidup sehat;
- c) Peserta wajib membawa perlengkapan ibadah dan olahraga sendiri;
- d) Peserta membawa obat-obatan sendiri jika mempunyai keluhan penyakit tertentu;
- e) Peserta diharapkan membawa laptop;
- f) Peserta membawa foto berukuran 3x4 sebanyak 3 lembar;
- g) Peserta wajib membawa cv berbentuk *softfile* dan *hardfile*;
- h) Peserta wajib mengisi surat pernyataan kesanggupan mengikuti pembelajaran sampai selesai;
- i) Peserta harus menyimpan bukti transportasi berupa kuitansi untuk diajukan acuan *reimburse* (pembayaran kembali);

3.4 Pelaksanaan Pembelajaran

A. Mekanisme Pelaksanaan

SKPP dilaksanakan dalam 3 Tingkatan yaitu SKPP Dasar, SKPP Menengah dan SKPP Lanjut. SKPP Dasar dilaksanakan oleh 34 Provinsi di Indonesia. SKPP Dasar di Provinsi Jawa Barat diikuti oleh 14 Kabupaten/kota terpilih yakni :

1. Kabupaten Cirebon
2. Kabupaten Indramayu
3. Kota Bandung
4. Kabupaten Cianjur
5. Kota Tasikmalaya
6. Kabupaten Sumedang
7. Kabupaten Bekasi
8. Kota Cimahi
9. Kabupaten Sukabumi
10. Kota Bogor
11. Kabupaten Garut
12. Kabupaten Subang
13. Kabupaten Bandung, dan
14. Kabupaten Bogor.

SKPP merupakan prioritas nasional yang pembiayaannya dibebankan kepada DIPA Bawaslu RI sehingga untuk kepanitiaan SKPP Dasar terdiri dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota. Bawaslu RI sebagai fasilitator atau yang memfasilitasi kegiatan sedangkan Bawaslu Provinsi dan

Bawaslu Kab/Kota sebagai pelaksana teknis kegiatan. Bawaslu RI menentukan jadwal SKPP Dasar dan narasumber eksternal. Kepanitiaan dari Bawaslu Kab/kota tuan rumah sebanyak 10 orang yang termasuk alumni SKPP terbaik sebelumnya sedangkan kepanitiaan dari Bawaslu Kab/Kota bukan tuan rumah sebanyak 2 (dua) orang terdiri dari Koordinator Divisi PHL dan Staf PHL. Untuk kepanitiaan dari Bawaslu Provinsi sebanyak 6 orang paling banyak terdiri dari 2 (dua) Fasilitator, kepesertaan, keuangan dan humas.

Bawaslu dengan dibantu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Jawa Barat melaksanakan SKPP Dasar di 7 (tujuh) titik lokasi kegiatan, yaitu:

1. Titik lokasi Kabupaten Cirebon (Kab. Cirebon dan Kab.Indramayu) dilaksanakan pada 21 - 23 Juni 2021;
2. Titik lokasi Kota Bandung (Kota Bandung dan Kab. Cianjur) dilaksanakan pada 18 - 20 Agustus 2021;
3. Titik lokasi Kota Tasikmalaya (Kota Tasikmalaya dan Kab. Sumedang) dilaksanakan pada 23 - 25 Agustus 2021;
4. Titik lokasi Kabupaten Bekasi (Kab. Bekasi dan Kota Cimahi) dilaksanakan 25 - 27 Agustus 2021;
5. Titik lokasi Kota Bogor (Kota Bogor dan Kab. Sukabumi) dilaksanakan pada 30 Agustus - 1 September 2021;
6. Titik lokasi Kabupaten Garut (Kab. Garut dan Kab. Subang) dilaksanakan pada 2 - 4 September 2021; dan
7. Titik lokasi Kabupaten Bandung (Kab. Bandung dan Kab. Bogor) dilaksanakan pada 6 - 8 September 2021.

Terdapat penanggungjawab untuk setiap titik lokasi kegiatan yang memudahkan koordinasi dengan dibuat WAG (*Whatsapp Group*) per titik lokasi untuk membahas teknis pelaksanaan, sebagai berikut :

1. Titik lokasi Kab. Cirebon: Agustine Wibiana Harso
2. Titik lokasi Kota Bandung: Teguh Rianto Bukit
3. Titik lokasi Kota Tasikmalaya: Isma Sulthon
4. Titik lokasi Kab. Bekasi : Trio Hamdoni
5. Titik lokasi Kota Bogor: Iji Jaelani
6. Titik lokasi Kab. Garut: Ayung Miranti Lestari
7. Titik lokasi Kab. Bandung: Ikhsan Fauzan Firmansyah

Jawa Barat mendapat kuota setiap titik sebanyak 90 orang dengan pembagian secara proporsional berdasarkan pendaftar terbanyak di setiap kab/kota. Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

SKPP DASAR 2021 DI PROVINSI JAWA BARAT

| NO | TANGGAL | LOKASI | KABUPATEN/KOTA | PESERTA | TEMPAT PELAKSANAAN |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-------------------------|
| | | | | KAB/KOTA | |
| 1 | 21-23 Juni 2021 | KAB. CIREBON | KAB. CIREBON | 53 | Apita Cirebon |
| | | | KAB. INDRAMAYU | 37 | |
| | Jumlah | | 90 | | |
| 2 | 2-4 September 2021 | KAB. GARUT | KAB. GARUT | 66 | Santika Garut |
| | | | KAB. SUBANG | 24 | |
| | Jumlah | | 90 | | |
| 3 | 25-27 Agustus 2021 | KAB. BEKASI | KAB. BEKASI | 65 | Holiday inn Jababeka |
| | | | KOTA CIMAHI | 25 | |
| | Jumlah | | 90 | | |
| 4 | 30 Agustus-1 September 2021 | KOTA BOGOR | KAB. SUKABUMI | 68 | Green Forest Bogor |
| | | | KOTA BOGOR | 22 | |
| | Jumlah | | 90 | | |
| 5 | 23-25 Agustus 2021 | KOTA TASIK | KOTA TASIKMALAYA | 64 | Santika Tasikmalaya |
| | | | KAB. SUMEDANG | 26 | |
| | Jumlah | | 90 | | |
| 6 | 18-20 Agustus 2021 | KOTA BANDUNG | KOTA BANDUNG | 64 | Holiday Inn Paster |
| | | | KAB. CIANJUR | 26 | |
| | Jumlah | | 90 | | |
| 7 | 6-8 September 2021 | KAB. BANDUNG | KAB. BANDUNG | 53 | Sutan Raja Hotel |
| | | | KAB. BOGOR | 37 | |
| | Jumlah | | 90 | | |
| Jumlah Total | | | | 630 | |

Waktu pelaksanaan SKPP selama 3 hari di setiap titik yang mana semuanya dilaksanakan di dalam kelas. Metode pembelajaran di dalam kelas menggunakan metode andragogi, yakni narasumber dan fasilitator dituntut untuk mendorong peserta lebih aktif dalam proses pembelajaran di setiap materi yang di fasilitasi baik narasumber ataupun fasilitator sehingga peserta bisa terlibat di dalam membuat peraturan kelas, membuat kontrak belajar, dan memahami setiap materi yang di berikan. Pola pendekatan andragogi dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif, yaitu: keterbukaan, kesetaraan, dan kebersamaan.

Teknik pembelajaran di dalam kelas meliputi :

- a. Ceramah,
- b. *Brainstorming* atau curah pendapat,
- c. Tanya jawab,
- d. Diskusi kelompok,
- e. Simulasi,
- f. Penggunaan alat peraga

Pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana pada SKPP Tahun 2021 ini setiap titik menyediakan *swab antigen*/tes usap, sehingga semua peserta yang akan mengikuti SKPP akan di *swab antigen*/tes usap terlebih dahulu sebelum memasuki ruangan, bukan hanya peserta namun panitia pun melakukan tes usap/swab antigen. Sehingga yang melaksanakan kegiatan pembelajaran SKPP baik peserta dan panitia dalam keadaan negatif Covid-19. Adapun peserta yang dinyatakan positif Covid-19 segera dipulangkan tanpa mengurangi hak administrasinya. Setelah dinyatakan negatif peserta dipersilahkan masuk dengan sebelumnya melakukan registrasi dengan menyerahkan persyaratan yang telah diinformasikan sebelumnya melalui surat undangan.

Pada H-1 sebelum pelaksanaan di tiap titik, lokasi Tim Bawaslu Provinsi Jawa Barat bersama tim Bawaslu RI dan Tim Bawaslu Kab/Kota mengadakan rapat teknis pelaksanaan baik melalui *zoom meeting* maupun secara langsung di tempat lokasi SKPP Dasar yang dikoordinasikan oleh setiap penanggungjawab titik lokasi.

Adapun tim Bawaslu Provinsi yang diberangkatkan di setiap titik lokasi adalah sebagai berikut:

1. Titik lokasi Kab. Cirebon: Andhika Pratama, Agustine Wibiana, Ridwan Raharja, Teguh Rianto Bukit, Isma Sulthon dan Irfan Patturohman
2. Titik lokasi Kota Bandung: Satrio Nugroho, Teguh Rianto Bukit, Ahmad Wari, Ayung Miranti, Agus Djaelani dan Jihad Khufaya
3. Titik lokasi Kota Tasikmalaya: Andhika Pratama, Isma Sulthon, Ikhsan Fauzan, Iji Jaelani, Teguh Rianto.
4. Titik lokasi Kab. Bekasi: Satrio Nugroho, Trio Hamdoni, Agustine Wibiana, Agus Djaelani, Ridwan Raharja, Nidzom Fikri
5. Titik lokasi Kota Bogor: Satrio Nugroho, Iji Jaelani, Trio Hamdoni, Azizah Nurhidayah, Ridwan Raharja, Ahmad Wari.
6. Titik lokasi Kab. Garut: Satrio Nugroho, Ayung Miranti, Trio Hamdoni, Ikhsan Fauzan, Agus Djaelani, Irfan Patturohman.
7. Titik lokasi Kab. Bandung: Satrio Nugroho, Ikhsan Fauzan, Ahmad Wari, Isma Sulthon, Iji Jaelani, Agustine Wibiana, Ayung Miranti

B. Materi SKPP Dasar

Materi dan topik SKPP Dasar telah disusun oleh Bawaslu RI sebagai berikut:

1. Seminar “Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum”
2. Pengisian Pre-test (berisi 10 soal kepemiluan)

3. Pengantar Pelatihan
 - a. Bina Suasana
 - b. Pemetaan Harapan dan Kekhawatiran
 - c. Kontrak Belajar
 - d. Pemilihan Ketua Kelas
4. Pembangunan Karakter
 - a. Integritas
 - b. Kerelawanan
 - c. Perspektif gender & Disabilitas
5. Pemilu dan Demokrasi-1
 - a. Dasar-Dasar Demokrasi
 - b. Sistem Pemilu dan Kepartaian
6. Pemilu dan Demokrasi-2
 - a. Lembaga Penyelenggara Pemilu
 - b. Pengenalan dan Fungsi Bawaslu
7. Kecakapan Dasar Pengawas Partisipasi 1
8. Kecakapan Dasar Pengawas Partisipatif 2
9. Pengisian *post test* (berisi 10 soal kepemiluan soal sama dengan soal pada saat *pre test*) dan Evaluasi Pelatihan
10. Rencana Tindaklanjut dan Pembentukan Komunitas

Pre tes dan *post test* dimaksudkan untuk mengukur kemampuan peserta sebelum dan sesudah pembelajaran SKPP, sehingga setiap peserta akan terlihat perubahan pada peningkatan kemampuannya. Adapun penyusunan RTL merupakan agenda yang akan dilaksanakan oleh peserta pasca pembelajaran. Rencana Tindak Lanjut ini dilaksanakan berkelompok sesuai dengan kab/kota asal dimana pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut peserta akan disupervisi oleh Bawaslu Kab/Kota dan dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi. Pemaparan awal rencana tindaklanjut dipandu oleh Fasilitator sedangkan penyusunan dan diskusi rencana tindaklanjut diserahkan kepada Bawaslu kab/kota dari masing-masing daerah per titik lokasi atau Koordinator Divisi PHL yang hadir pada titik tersebut.

Rencana tindaklanjut memuat:

- a. Nama Kader/Kelompok
- b. Nama Kegiatan
- c. Tujuan Kegiatan
- d. Sasaran Kegiatan
- e. Metode Kegiatan
- f. Waktu Pelaksanaan

3.5 NARASUMBER DAN FASILITATOR SKPP DASAR

Narasumber terdiri dari narasumber internal (Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kab/Kota) dan narasumber expert yang ditentukan oleh Bawaslu RI. Berikut narasumber expert per titik lokasi di Jawa Barat :

1. Titik lokasi Kab. Cirebon: Erik Kurniawan (Sindikasi Pemilu dan Demokrasi);
2. Titik lokasi Kota Bandung: Arbain (akademisi);
3. Titik lokasi Kota Tasikmalaya: Radian Syam (akademisi FH Trisakti);
4. Titik lokasi Kab. Bekasi: Erik Kurniawan (Sindikasi Pemilu dan Demokrasi);
5. Titik lokasi Kota Bogor: Titik Anggraini (dewan pembina perwujudan) melalui *zoom meeting*;
6. Titik lokasi Kab. Garut: Arbain (Indonesian Parliamentary Center) melalui *zoom meeting*;
7. Titik lokasi Kab. Bandung: SBE Wardani (akademisi FISIP UI).

Teknis penyampaian materi antara Bawaslu Kab/Kota dan Bawaslu Provinsi adalah panel, Bawaslu Kab/Kota menyampaikan materi kemudian dibulatkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Untuk narasumber expert semua menyampaikan materi secara langsung kecuali Arbain di titik lokasi Kab. Garut dan Titik Anggraini di titik lokasi Kota Bogor yang menyampaikan materi secara daring melalui *zoom meeting*.

Fasilitator dalam SKPP Dasar terdiri dari Fasilitator Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Fasilitator Bawaslu Kab/kota. Fasilitator Bawaslu Provinsi yakni, Agus Djaelani, Ridwan Raharja, Ikhsan Fauzan Firmansyah, Iji Jaelani, Ahmad Wari dan Tegun Rianto Bukit. Secara rinci penjadwalan fasilitator dapat dilihat sebagai berikut :

1. Titik lokasi Kab. Cirebon
 - Fasilitator Bawaslu Provinsi: Ridwan Raharja dan teguh Rianto
 - Fasilitator Bawaslu Kab/Kota: Evos, Dessy (Bawaslu Kab. Cirebon) Agus Rianto (Bawaslu Kab. Indramayu)
2. Titik lokasi Kota Bandung
 - Fasilitator Bawaslu Provinsi: Agus Djaelani dan Ahmad War
 - Fasilitator Bawaslu Kab/Kota: Dimas, Rida (Bawaslu Kota Bandung), Deri Nurjahid (Bawaslu Kab. Cianjur)
3. Titik lokasi Kota Tasikmalaya
 - Fasilitator Bawaslu Provinsi: Ikhsan Fauzan Firmansyah dan Teguh Rianto Bukit
 - Fasilitator Bawaslu Kab/Kota: Hendra, Zaki Patama (Bawaslu Kota Tasikmalaya), Yusup (Bawaslu Kab. Sumedang)
4. Titik lokasi Kab. Bekasi
 - Fasilitator Bawaslu Provinsi: Agus Djaelani dan Trio Hamdoni

- Fasilitator Bawaslu Kab/Kota: Haikal, Fahmi (Bawaslu Kab. Bekasi), Nurul (Bawaslu Kota Cimahi)
5. Fasilitator Kota Bogor
- Fasilitator Bawaslu Provinsi: Iji Jaelani dan Ridwan Raharja
 - Fasilitator Bawaslu Kab/Kota: Dayat Hidayat dan Arif (Bawaslu Kota Bogor), Mufa Tholillah (Bawaslu Kab. Sukabumi)
6. Fasilitator Kab. Garut
- Fasilitator Bawaslu Provinsi: Agus Djaelani dan Ikhsan Fauzan
 - Fasilitator Bawaslu Kab/kota: Huda Dindin P, Yedi Humaidi (Bawaslu Kab. Garut), Yudha (Bawaslu Kab. Subang)
7. Fasilitator Kab. Bandung
- Fasilitator Bawaslu Provinsi: Ikhsan Fauzan dan Iji Jaelani
 - Fasilitator Bawaslu Kab/Kota: Adik Najmudin, Adam Hais (Bawaslu Kab. Bandung), Azmi (Bawaslu Kab. Bogor)

3.6 PENILAIAN PESERTA

Penilaian peserta pada saat kelas/forum terdiri dari penilaian *pre test*, *post test*, penilaian materi setiap sesi, penilaian Rencana Tindaklanjut dan penilaian kedisiplinan (disiplin dalam waktu, disiplin dalam berpakaian dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan/materi tanpa terkecuali). Penilaian tersebut menjadi salah satu rekomendasi peserta untuk melanjutkan ke SKPP Tingkat Menengah selain proporsionalitas dan keterwakilan perempuan. Penilaian peserta dilakukan oleh PJ penilaian setiap titik lokasi dari tim Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Format penilaian disusun oleh Tim Bawaslu RI.

3.7 PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI 7 (TUJUH) TITIK DI JAWA BARAT

a) Titik Lokasi Kabupaten Cirebon

Kegiatan SKPP Dasar yang dilaksanakan di titik lokasi Kab. Cirebon merupakan gabungan dari peserta Kab. Cirebon dengan Kab. Indramayu. Peserta dari Kab. Cirebon sebanyak 53 orang dan peserta dari Kab. Indramayu sebanyak 37 orang. Tempat pelaksanaan di Hotel Apita Cirebon pada tanggal 21-23 Juni 2021. Peserta yang ditetapkan hadir sesuai kuota sebanyak 90 orang, namun terdapat peserta yang positif 1 orang dari Kabupaten Indramayu atas nama Firman Dwi Putra Mahendra dan 6 orang tidak hadir pada hari pelaksanaan dari Kab. Cirebon atas nama Egi Fernandi, Hasanudin, Feby Alfiana, Mabit Abdul Aziz, Indra Bachri dan Agung Sigit Prasetyo. Sehingga pada akhir kegiatan seluruh peserta titik lokasi Kab. Cirebon (Kab. Cirebon dan Kab. Indramayu) berjumlah 83 orang. Pada awal kegiatan peserta diberikan modul dan seminar kit (*id card*, *goody bag*, masker) dan melakukan registrasi serta menyerahkan persyaratan yang telah diinformasikan sebelumnya (surat

pernyataan, foto 3x4 sebanyak 3 lembar, CV *sofffile* dan *hardfile*) sedangkan pada akhir kegiatan peserta diberikan sertifikat, uang harian dan uang pengganti transportasi.

Titik Lokasi Kab. Cirebon merupakan SKPP Dasar Pertama di Jawa Barat yang dilaksanakan pada Tahun 2021 yang secara resmi kegiatan dibuka oleh Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu RI, Bapak Mochammad Afifudin. Sedangkan acara penutupan secara resmi ditutup oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bapak Zaki Hilmi yang dihadiri oleh seluruh Pimpinan Bawaslu Kab. Cirebon dan Koordinator Divisi PHL Kab. Indramayu (Bapak Supriadi). Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Setelah kegiatan titik lokasi pertama Cirebon terlaksana, kegiatan SKPP Dasar di titik lokasi selanjutnya belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal karena situasi Covid-19 tidak terkendali sehingga pemerintah memberlakukan PPKM darurat pada tanggal 3 Juli dan hampir semua kab/kota terpilih berada di level 4 mengakibatkan kegiatan SKPP ditunda untuk sementara waktu.

Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia melakukan Rapat koordinasi pada tanggal 21 Juli melalui *zoom meeting* yang dihadiri oleh Bapak Mochammad Afifuddin, Bapak La Bayoni, dan TA Bawaslu RI, Masykurudin Hafidz. Terkait evaluasi SKPP Dasar yang telah terlaksana, situasi terkiri Covid-19 serta mekanisme pembelajaran peserta yang sempat diajukan 50:50 selama 3 hari. Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat internal dengan 12 Kab/Kota (kecuali Cirebon dan Indramayu) pada tanggal 2 Agustus 2021 dalam mendiskusikan arahan Bawaslu RI terkait *regrouping* titik lokasi SKPP dengan mempertimbangkan kesiapan kab/kota dalam situasi Pandemi Covid-19 untuk diajukan ke Bawaslu RI. Sebelumnya Bawaslu Jawa Barat telah mengisi *Google Form* Perubahan jadwal SKPP yang diberikan Bawaslu RI melalui WAG (*Whastapp Group*).

Rapat Koordinasi Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota dilaksanakan melalui *zoom meeting* pada tanggal 4 Agustus 2021, yang menghasilkan syarat pelaksanaan SKPP pasca PPKM darurat sebagai berikut:

1. Bawaslu kab/kota berkoordinasi dengan para pihak dan menyampaikan ke Bawaslu Provisi
2. Status daerah sudah hijau atau maksimal kuning
3. Mendapatkan izin dari gugus tugas
4. Jika ada penundaan minimal 5 hari sebelum pelaksanaan sudah terinformasikan kepada bawaslu RI

5. Bawaslu Provinsi menyampaikan ke Bawaslu RI kesiapan jadwal dan tempat
6. Peserta wajib vaksin pertama atau kedua
7. Pelaksanaan SKPP Menengah mulai minggu pertama September
8. Pengambilan informasi untuk minggu pertama Agustus (3-5 Agustus) dilakukan pada 28 Juli
9. Pilihan protokol kesehatan dalam akomodasi

Koordinasi tuan rumah SKPP dengan satgas dan pemerintah daerah lancar dan setiap kondisi terkini dilaporkan di grup SKPP 2021 oleh Bawaslu Kab/Kota tuan rumah. Sehingga pada akhirnya SKPP Dasar 2021 di Jawa Barat kembali dapat dilaksanakan.

b) Titik Lokasi Kota Bandung

Kegiatan SKPP Dasar yang dilaksanakan di titik lokasi Kota Bandung merupakan gabungan dari peserta Kota Bandung dan peserta Kab. Cianjur. Peserta dari Kota Bandung sebanyak 64 dan peserta dari Kab. Cianjur sebanyak 26 orang. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Holiday Inn Paster, Kota Bandung pada tanggal 18-20 Agustus 2021. Terdapat 1 orang dari Kab. Cianjur yang dinyatakan positif atas nama, Ali Akbar Muhammad Syam. Sehingga jumlah peserta menjadi 89 orang. Peserta yang dinyatakan negatif diarahkan untuk melakukan registrasi dan menyerahkan persyaratan yang telah diinformasikan sebelumnya (surat pernyataan, foto 3x4 sebanyak 3 lembar, CV *sofffile* dan *hardfile*). Peserta juga mendapatkan seminar kit berupa *id card*, *goody bag* dan masker.

Pimpinan Bawaslu RI yang secara resmi membuka kegiatan adalah Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Ibu Ratna Dewo Pettalolo, sedangkan acara penutupan secara resmi ditutup oleh Koordinator Hukum Datin Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bapak Yusup Kurnia. Baik pembukaan maupun penutupan dihadiri lengkap oleh pimpinan Bawaslu Kota Bandung dan seluruh Pimpinan Bawaslu Kab. Cianjur. Pada akhir kegiatan peserta diberikan modul, sertifikat, uang harian dan uang pengganti transportasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

c) Titik Lokasi Kota Tasikmalaya

Kegiatan SKPP Dasar yang dilaksanakan di titik lokasi Kota Tasikmalaya merupakan gabungan dari peserta Kota Tasikmalaya dan peserta Kab. Sumedang. Peserta Kota Tasikmalaya sebanyak 64 orang dan peserta Kab. Sumedang sebanyak 26 orang. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Santika Tasikmalaya pada tanggal 23-25 Agustus 2021. Seluruh peserta hadir lengkap. Peserta yang dinyatakan negatif diarahkan untuk melakukan registrasi dan menyerahkan persyaratan yang telah

diinformasikan sebelumnya (surat pernyataan, foto 3x4 sebanyak 3 lembar, CV *sofffile* dan *hardfile*). Peserta juga mendapatkan seminar kit berupa id card, goody bag dan masker.

Adapun pimpinan Bawaslu RI yang membuka kegiatan secara resmi adalah Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Ibu Ratna Dewo Pettalolo, sedangkan acara penutupan secara resmi ditutup oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Bapak Sutarno, SH. Baik pembuka maupun penutupan dihadiri oleh seluruh pimpinan Bawaslu Kota Tasikmalaya dan seluruh pimpinan Kab. Sumedang. Pada akhir kegiatan peserta diberikan modul, sertifikat, uang harian dan uang pengganti transportasi. Pada akhir kegiatan peserta diberikan modul, sertifikat, uang harian dan uang pengganti transportasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

d) Titik Lokasi Kab. Bekasi

Kegiatan SKPP Dasar yang dilaksanakan di titik lokasi Kab. Bekasi merupakan gabungan dari peserta Kab. Bekasi dan peserta Kota Cimahi. Peserta dari Kab. Bekasi sebanyak 65 orang dan peserta dari Kota Cimahi sebanyak 25 orang. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Holiday Inn Jababeka, Kab. Bekasi pada tanggal 25-27 Agustus 2021. Peserta sebanyak 90 orang hadir lengkap. Peserta yang dinyatakan negatif diarahkan untuk melakukan registrasi dan menyerahkan persyaratan yang telah diinformasikan sebelumnya (surat pernyataan, foto 3x4 sebanyak 3 lembar, CV *sofffile* dan *hardfile*). Peserta juga mendapatkan seminar kit berupa *id card*, *goody bag* dan masker.

Pimpinan Bawaslu RI yang membuka kegiatan secara resmi adalah Koordinator Divisi Hukum Datin, Bapak Fritz Edward Siregar. Sedangkan yang menutup acara secara resmi adalah Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal, Bapak Zaki Hilmi. Baik acara pembukaan dan penutupan dihadiri oleh seluruh pimpinan Bawaslu Kab. Bekasi dan seluruh pimpinan Bawaslu Kota Cimahi. Pada akhir kegiatan peserta diberikan modul, sertifikat, uang harian dan uang pengganti transportasi. Pada akhir kegiatan peserta diberikan modul, sertifikat, uang harian dan uang pengganti transportasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

e) Titik Lokasi Kota Bogor

Kegiatan SKPP Dasar yang dilaksanakan di titik lokasi Kota Bogor merupakan gabungan dari peserta Kota Bogor dan peserta Kab. Sukabumi. Peserta Kota Bogor sebanyak 22 orang dan peserta Kab. Sukabumi sebanyak 68 orang. Seluruh peserta sebanyak 90 orang hadir lengkap. Peserta yang dinyatakan negatif diarahkan untuk melakukan registrasi dan menyerahkan persyaratan yang telah diinformasikan

sebelumnya (surat pernyataan, foto 3x4 sebanyak 3 lembar, CV *sofffile* dan *hardfile*). Peserta juga mendapatkan seminar kit berupa *id card*, *goody bag* dan masker.

Berbeda dengan SKPP Dasar di titik lain, narasumber expert, ibu Titik Anggraini menyampaikan materi secara daring karena satu dan lain hal. Kegiatan dilaksanakan di Green Forest, Kota Bogor pada tanggal 30 Agustus sampai dengan 1 September 2021. Adapun pimpinan Bawaslu RI yang membuka secara resmi adalah Koordinator Divisi Hukum Datin, Bapak Fritz Edward Siregar. Sedangkan pada acara penutupan secara resmi ditutup oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal, Bapak Zaki Hilmi. Pembukaan dihadiri oleh seluruh pimpinan Bawaslu Kota Bogor dan seluruh pimpinan Bawaslu Kab. Sukabumi sedangkan pada saat penutupan dihadiri oleh seluruh pimpinan Kota Bogor serta Ketua Bawaslu Kab. Sukabumi (Bapak Teguh Hariyanto) dan Koordinator Divisi SDMO Kab. Sukabumi (Ibu Nuryamah). Pada akhir kegiatan peserta diberikan modul, sertifikat, uang harian dan uang pengganti transportasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

f) Titik Lokasi Kab. Garut

Kegiatan SKPP Dasar yang dilaksanakan di titik lokasi Kab. Garut merupakan gabungan peserta Kab. Garut dan peserta Kab. Subang. Peserta Kab. Garut sebanyak 66 orang dan peserta kab. Subang sebanyak 24 orang. Seluruh peserta sebanyak 90 orang hadir lengkap. Peserta yang dinyatakan negatif diarahkan untuk melakukan registrasi dan menyerahkan persyaratan yang telah diinformasikan sebelumnya (surat pernyataan, foto 3x4 sebanyak 3 lembar, CV *sofffile* dan *hardfile*). Peserta juga mendapatkan seminar kit berupa *id card*, *goody bag* dan masker.

Sama dengan SKPP di titik lokasi Kota Bogor, narasumber expert di titik lokasi Kab. Garut, Bapak Arbain menyampaikan materi secara daring karena satu dan lain hal. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Santika Garut pada tanggal 2-4 September 2021 yang secara resmi dibuka oleh Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal, Bapak Mochammad Afifuddin. Sedangkan acara penutupan secara resmi ditutup oleh Bapak H. Wasikin Marzuki. Baik pada saat pembukaan dihadiri lengkap oleh seluruh pimpinan Bawaslu Kab. Garut serta Ketua Bawaslu Kab. Subang (Bapak Drs. Parahutan Harahap) dan Koordinator Divisi PHL Kab. Subang (Bapak Imanudin). Sedangkan pada saat penutupan dihadiri oleh seluruh pimpinan Bawaslu Kab. Garut dan Koordinator Divisi PHL Kab. Subang (Bapak Imanudin). Pada akhir kegiatan peserta diberikan modul, sertifikat, uang harian dan uang pengganti transportasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

g) Titik Lokasi Kab. Bandung

Kegiatan SKPP Dasar yang dilaksanakan di titik lokasi Kab. Bandung merupakan gabungan peserta Kab. Bandung dan peserta Kab. Bogor. Peserta dari Kab. Bandung sebanyak 53 orang dan peserta dari Kab. Bogor sebanyak 37 orang. Terdapat 1 (satu) orang peserta yang dinyatakan positif dari Kab. Bogor atas nama Renaldi Juniar. Peserta diarahkan untuk pulang karena peserta membawa kendaraan bermotor namun hak peserta tetap diberikan. Sehingga peserta SKPP Dasar Titik lokasi Kab. Bandung berjumlah 89 orang. Peserta yang dinyatakan negatif diarahkan untuk melakukan registrasi dan menyerahkan persyaratan yang telah diinformasikan sebelumnya (surat pernyataan, foto 3x4 sebanyak 3 lembar, CV *sofffile* dan *hardfile*). Peserta juga mendapatkan seminar kit berupa *id card*, *goody bag* dan masker.

Kegiatan dilaksanakan di Sutan Raja Hotel & Convention, Soreang, Kab. Bandung pada tanggal 6-8 September 2021 yang secara resmi dibuka oleh Koordinator Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Bapak Rahmat Bagja. Sedangkan pada saat penutupan hadir Tenaga Ahli Bawaslu RI, Bapak Masykurudin Hafidz memberikan sambutan sekaligus arahan. Kegiatan skpp di titik lokasi Kab. Bandung secara resmi di tutup oleh Koordinator Pengawasan dan Hubal Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bapak Zaki Hilmi. Pada saat pembukaan dihadiri oleh seluruh pimpinan Bawaslu kab. Bandung dan Pimpinan Bawaslu Kab. Bogor (Bapak Ridwan Arifin, Bapak Burhanudin, Ibu Nataolia Apapyo). Sedangkan pada saat penutupan dihadiri oleh seluruh pimpinan Bawaslu Kab. Bandung serta Ketua Bawaslu Kab. Bogor (Bapak Irvan Firmansyah) dan Korodinator Divisi PHL Kab. Bogor (Bapak Burhanudin). Pada akhir kegiatan peserta diberikan modul, sertifikat, uang harian dan uang pengganti transportasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Selama kegiatan SKPP Dasar terdapat total 9 orang peserta yang tidak dapat melaksanakan SKPP Dasar dengan rincian :

SKPP Tilok Kab. Cirebon :

- 6 orang tidak hadir dari Kab. Cirebon
- 1 orang positif Covid-19 dari Kab. Indramayu

SKPP Tilok Kota Bandung :

- 1 orang positif Covid-19 dari Kab. Cianjur

SKPP Tilok Kab. Bandung :

- 1 orang positif Covid-19 dari Kab. Bogor

Dari data di atas, total peserta SKPP Dasar Tahun 2021 sebanyak 621 orang dengan rincian 398 orang laki-laki (64,09%) dan 223 orang perempuan (35,90%) yang kemudian akan diseleksi kembali untuk menuju ke tahap SKPP Tingkat Menengah.

B. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Menengah

2.1 PERSIAPAN KEGIATAN

Persiapan pelaksanaan SKPP Menengah di Provinsi Jawa Barat :

1. Rapat internal Bagian Pengawasan dan Hubal pada tanggal 13 September 2021 melalui *zoom meeting*;
2. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan SKPP Tingkat Dasar dan Perencanaan SKPP Tingkat Menengah Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2021 bertempat di Ruang Lantai 5 Gedung Bawaslu RI terundang Bapak Zaki Hilmi, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal;
3. Rapat Internal Bagian Pengawasan dan Hubal pada tanggal 4 Oktober 2021 melalui *zoom meeting*;
4. Rapat Koordinasi bersama 14 Kab/Kota pada tanggal 7 oktober melalui *zoom meeting*;
5. Bawaslu Kab. Karawang telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Satgas Kab. Karawang guna mengupayakan kegiatan SKPP Menengah dapat terlaksana.

2.2 PROSES SELEKSI

Proses seleksi peserta SKPP Menengah Tahun 2021 berlangsung selama 29 hari terhitung pada tanggal 9 September sampai dengan 7 Oktober 2021. Proses seleksi peserta SKPP Menengah berdasarkan arahan Bawaslu RI memiliki syarat sebagai berikut :

1. Peserta SKPP Menengah berasal dari SKPP Dasar;
2. Jumlah peserta SKPP Menengah wajib diatas 30 persen perempuan
3. Jumlah peserta SKPP Menengah wajib menyertakan peserta dari kelompok disabilitas, masyarakat terpinggirkan dan kelompok rentan lainnya.
4. Peserta SKPP menengah wajib mempertimbangkan keragaman latar belakang, kelompok dan organisasi.
5. Sebelum ditetapkan sebagai peserta SKPP Menengah, Bawaslu Provinsi menyampaikan data calon peserta ke Bawaslu RI untuk mendapatkan masukan. Bawaslu Provinsi menetapkan peserta SKPP Menengah dan mengumumkan melalui laman masing-masing.

Penilaian, keterwakilan perempuan, proporsionalitas dan latar belakang peserta menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan peserta SKPP Menengah. Berdasarkan hasil pada Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan

SKPP Tingkat Dasar dan Perencanaan SKPP Tingkat Menengah Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2021, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mendapatkan kuota sebanyak 45 orang untuk peserta SKPP Menengah setengah dari jumlah peserta SKPP Dasar per titik lokasi. Peserta SKPP Dasar yang terpilih ke SKPP Menengah adalah sebagai berikut :

| Kabupaten/Kota | Nama Peserta | Jenis Kelamin |
|----------------|-------------------------------|---------------|
| Kab.Bekasi | Rycas Firdaus | Laki-Laki |
| Kab.Bekasi | Muhamad Alim | Laki-Laki |
| Kab.Bekasi | Dicky Sadikin | Laki-Laki |
| Kab.Bekasi | Mita Ayu Andiyani | Perempuan |
| Kota Cimahi | Zayyuna Bithorqi | Laki-Laki |
| Kota Cimahi | Cep Wilman | Laki-Laki |
| Kab. Sukabumi | Imelda islamiyati | Perempuan |
| Kab. Sukabumi | Maulida Zahra Kamila | Perempuan |
| Kab. Sukabumi | Yadi | Laki-Laki |
| Kab. Sukabumi | Ahmad Hasbi Muzaki | Laki-Laki |
| Kota Bogor | Dwi Septian Hermawan | Laki-Laki |
| Kota Bogor | Toni Al-Fazri | Laki-Laki |
| Kab.Cirebon | Mifah Oktafianingsih | Perempuan |
| Kab.Cirebon | muhammad yusuf | Laki-Laki |
| Kab.Cirebon | Ahmad Yusuf | Laki-Laki |
| Kab.Cirebon | Shelvy Nujuliyani | Perempuan |
| Kab. Indramayu | Dewi Raudhlatul Jannah | Perempuan |
| Kab. Indramayu | Agis Ali Hasan | Laki-Laki |
| Kab. Garut | Muhammad Haffas Zulfikar | Laki-Laki |
| Kab. Garut | Albin Muhammad Ridwan | Laki-Laki |
| Kab. Garut | Ridwan Abdulloh | Laki-Laki |
| Kab. Garut | Syifa Khaerunnisa | Perempuan |
| Kab. Subang | Zaka Azkia Muzaki | Laki-Laki |
| Kab. Subang | Haiva Nurul Wahdaniyah | Perempuan |
| Kab. Subang | Maya Nurfarida | Perempuan |
| Kab. Bandung | Resa Noelsa | Perempuan |
| Kab. Bandung | Muhammad Fadlli Robbi Rodiyya | Laki-Laki |
| Kab. Bandung | Imam hidayat | Laki-Laki |
| Kab. Bandung | Asep Muhammad | Laki-Laki |
| Kab. Bogor | Fahri Fadhilah | Laki-Laki |
| Kab. Bogor | Ghilman Hanif | Laki-Laki |
| Kab. Bogor | Rajab ahirullah | Laki-Laki |
| Kota Bandung | Aripin | Laki-Laki |
| Kota Bandung | Usamah | Laki-Laki |

| | | |
|---------------|--------------------------------|-----------|
| Kota Bandung | Iis Siti Nurjanah | Perempuan |
| Kota Bandung | Intan Trenda Ridhosari | Perempuan |
| Kab. Cianjur | An-an Hasanah | Perempuan |
| Kab. Cianjur | Syarif Hidayatulloh | Laki-Laki |
| Kab. Cianjur | M. Akbar Afrainsyah | Laki-Laki |
| Kota Tasik | Dini Anjani Nurlatifah | Perempuan |
| Kota Tasik | Arip Muztabasani | Laki-Laki |
| Kota Tasik | Anggi | Laki-Laki |
| Kota Tasik | Acep Nur Zam Zam | Laki-Laki |
| Kab. Sumedang | Raka Junisar | Laki-Laki |
| Kab. Sumedang | Michael Ronaldo Putra Sitohang | Laki-Laki |

Adapun rincian per kab/kota adalah sebagai berikut :

1. 4 orang peserta terbaik SKPP Dasar dari Kabupaten Cirebon;
2. 2 orang peserta terbaik SKPP Dasar dari Kabupaten Indramayu;
3. 4 orang peserta terbaik SKPP Dasar dari Kota Bandung;
4. 3 orang peserta terbaik SKPP Dasar dari Kabupaten Cianjur;
5. 4 orang peserta terbaik SKPP Dasar dari Kota Tasikmalaya;
6. 2 orang peserta terbaik SKPP Dasar dari Kabupaten Sumedang;
7. 4 orang peserta terbaik SKPP Dasar dari Kabupaten Bekasi;
8. 2 orang peserta terbaik SKPP Dasar dari Kota Cimahi;
9. 2 orang peserta terbaik SKPP Dasar dari Kota Bogor;
10. 4 orang peserta terbaik SKPP Dasar dari Kabupaten Sukabumi;
11. 4 orang peserta terbaik SKPP Dasar dari Kabupaten Garut;
12. 3 orang peserta terbaik SKPP Dasar dari Kabupaten Subang;
13. 4 orang peserta terbaik SKPP Dasar dari Kabupaten Bandung;
14. 3 orang peserta terbaik SKPP Dasar dari Kabupaten Bogor.

Peserta SKPP Menengah sebanyak 45 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 31 orang (68,89%) dan perempuan sebanyak 14 orang (31,11 %). Terdapat disabilitas tuna daksa 1 (satu) orang atas nama Asep Muhamad Abduh dari Kab. Bandung, terdapat peserta lintas iman yang beragama Protestan atas nama Michael Ronaldo Putra Sitohang dari Kab. Sumedang. Peserta di atas memiliki latar belakang organisasi. Secara lebih jelas keberagaman organisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

| Kabupaten/ Kota | Nama Peserta | Jenis Kelamin | Organisasi |
|--------------------|---------------|------------------|------------------------------------|
| Kab.Bekasi | Rycas Firdaus | Laki-Laki | HMI, PERMASI |
| | Muhamad Alim | Laki-Laki | PMII, Founder Sadar Bekasi, Co- |

| | | | |
|----------------|--------------------------|-----------|--|
| | | | Founder Hifa Institute |
| | Dicky Sadikin | Laki-Laki | GP ANSOR, PMII |
| | Mita Ayu Andiyani | Perempuan | Korps HMI-WATI |
| Kota Cimahi | Zayyuna Bithorqi | Laki-Laki | PMII, KEMBARA |
| | Cep Wilman | Laki-Laki | GMNI, IREMA, HIMA KESMAS |
| Kab. Sukabumi | Imelda islamiyati | Perempuan | PMII, KALAM Bandung Raya |
| | Maulida Zahra Kamila | Perempuan | KOPRI PMII |
| | Yadi | Laki-Laki | HMI |
| | Ahmad Hasbi Muzaki | Laki-Laki | HMI, Hima Ipol Fisip UIN SGD Bandung |
| Kota Bogor | Dwi Septian Hermawan | Laki-Laki | GMNI |
| | Toni Al-Fazri | Laki-Laki | Ketua Rayon Fakultas Hukum, Ketua HIMA Muaragembong, Anggota DPM FH UIKA |
| Kab.Cirebon | Mifah Oktafianingsih | Perempuan | HMI, BEM |
| | muhammad yusuf | Laki-Laki | PMII |
| | Ahmad Yusuf | Laki-Laki | PMII, IPNU, KNPI |
| | Shelvy Nujuliyani | Perempuan | HMI |
| Kab. Indramayu | Dewi Raudhdlatul Jannah | Perempuan | PMII, WOMAN MARCH INDRMAYU |
| | Agis Ali Hasan | Laki-Laki | PMII, Dema STAIS Dharma |
| Kab. Garut | Muhammad Haffas Zulfikar | Laki-Laki | PMII |
| | Albin Muhammad Ridwan | Laki-Laki | HMI, IPM |
| | Ridwan Abdulloh | Laki-Laki | PMII, BEM, DPM, IMG, IMAPELA |
| | Syifa Khaerunnisa | Perempuan | HMI, PERMATA INTAN GARUT |
| Kab. Subang | Zaka Azkia Muzaki | Laki-Laki | PRAMUKA, HMI, GP ANSOR |

| | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|--|
| | Haiva Nurul Wahdaniyah | Perempuan | PC FATAYAT NU, KOPRI PMII, BEM |
| | Maya Nurfarida | Perempuan | HMI, HIMA, KARANG TARUNA |
| Kab. Bandung | Resa Noelsa | Perempuan | Pramuka, PMII |
| | Muhammad Fadlli Robbi Rodyya | Laki-Laki | HMI, Lembaga Pers Mahasiswa Suaka, Founder dan Ketua Inspirasi Nabi Comunity, Perhumas Muda Bandung |
| | Imam hidayat | Laki-Laki | GP ANSOR, KARANG TARUNA, KPAI Kab. Bandung |
| | Asep Muhammad | Laki-Laki | KAMMI |
| Kab. Bogor | Fahri Fadhilah | Laki-Laki | Pramuka, HMI, |
| | Ghilman Hanif | Laki-Laki | Pemuda PUI, lingkaran Cahaya Institute, Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Bogor, Bakoornas Lembaha Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa islam PB HMI, HMI cabang ciputat, |
| | Rajab Ahrillah | Laki-Laki | PMII, BEM, Penulis di Justitia Indonesia |
| Kota Bandung | Aripin | Laki-Laki | GMNI, HIMA PEKO |
| | Usamah | Laki-Laki | HMI |
| | lis Siti Nurjanah | Perempuan | PMII |
| | Intan Trenda Ridhosari | Perempuan | PMII, Sahabat |

| | | | |
|---------------|--------------------------------|-----------|--|
| | | | Museum KAA |
| Kab. Cianjur | An-an Hasanah | Perempuan | Protokoler STAI Al-Azhar Cianjur, HMI, KIPP Cianjur, Himat Cianjur |
| | Syarif Hidayatulloh | Laki-Laki | GMNI, BEM |
| | M. Akbar Afrainsyah | Laki-Laki | HIMA Tjianjur (HIMAT) Kab. Cianjur, poros Nusantara (POSNU) kab. Cianjur, JPPR Kab. Cianjur, PMII Kab. Cianjur |
| Kota Tasik | Dini Anjani Nurlatifah | Perempuan | HMI, IPM |
| | Arip Muztabasani | Laki-Laki | GP ANSOR, Karang Taruna, PMII |
| | Anggi | Laki-Laki | Pemuda Muhammadiyah, Karang taruna, Irema |
| | Acep Nur Zam Zam | Laki-Laki | HMI, Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya, Forum Mahasiswa Bantarkalong |
| Kab. Sumedang | Raka Junisar | Laki-Laki | GP ANSOR |
| | Michael ronaldo Putra Sitohang | Laki-Laki | GMKI |

Penyampaian undangan peserta dan undangan kepada kabupaten/kota pada tanggal 8 Oktober 2021. Bawaslu kab/kota yang diundang pada pembukaan dan penutupan SKPP Menengah adalah Koordinator Divisi PHL/kepala Sekolah SKPP dan 1 (satu) orang staf Divisi PHL/PJ SKPP. Adapun uang harian dan transportasi Koordinator PHL dan Staf tersebut dibebankan kepada Bawaslu kab/kota. Penyampaian surat undangan untuk peserta yang lolos ke SKPP Menengah disampaikan melalui Bawaslu Kab/Kota masing-masing di 14 kab/kota. Untuk teknis pemberangkatan peserta SKPP

Menengah itu beragam, ada yang langsung dibawah koordinasi Bawaslu kab/kota ada juga mandiri atau berangkat sendiri.

Adapun hal-hal yang dipedomani oleh peserta yang lolos mengikuti SKPP Menengah adalah sebagai berikut:

1. Selama mengikuti kegiatan, peserta wajib memenuhi protokol pencegahan Covid-19 menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan/menggunakan *handsanitizer*;
2. Untuk menjamin keselamatan peserta dan pemenuhan persyaratan dalam masa pandemi Covid-19, peserta wajib mengikuti *swab test*/tes usap yang disiapkan oleh panitia;
3. Peserta SKPP Tingkat Menengah dimohon untuk mempersiapkan diri dan menjaga kesehatan dengan berperilaku hidup sehat, apabila peserta tidak dapat memenuhi persyaratan (positif Covid-19), maka peserta tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan SKPP Tingkat Menengah Tahun 2021 di Jawa Barat;
4. Peserta wajib membawa perlengkapan ibadah dan olahraga sendiri;
5. Peserta membawa obat-obatan sendiri jika mempunyai keluhan penyakit tertentu;
6. Peserta membawa foto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar;
7. Peserta membawa CV *softfile* dan *hardfile*;
8. Peserta wajib mengisi surat pernyataan kesanggupan mengikuti pembelajaran sampai selesai;

2.3 MATERI/MATRIK KURIKULUM SKPP TINGKAT MENENGAH

Materi-materi yang disampaikan pada SKPP Menengah adalah sebagai berikut:

1. Seminar “Penguatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum”, disampaikan oleh Bapak Zaki Hilmi dan narasumber eksternal Bapak Alwan Ola Riantoby.
2. Pengisian Pre Test (sebanyak 10 soal) dipandu oleh fasilitator
3. Pengantar Pelatihan (Bina suasana (Pemetaan Harapan dan Kekhawatiran, Kontrak Belajar & Pemilihan Ketua Kelas), indikator pencapaiannya tercipta suasana akrab, saling kenal, tertib dan terkendali. Pada sesi ini dipandu oleh fasilitator.
4. Review Materi SKPP Tingkat Dasar, indikator pencapaiannya diketahui tingkat pengetahuan, kecakapan dan karakter peserta. Sesi ini dipandu oleh fasilitator;
5. Review Materi, Diskusi dan Penugasan, indikator pencapaian memahami prinsip dan tujuan review pelatihan dan peserta lebih memahami materi-materi pelatihan. Sesi ini dipandu oleh fasilitator;

6. Pembangunan Karakter. Materi ini dipandu oleh Bapak Yulianto dan narasumber eksternal, Bapak Erik Kurniawan.
 - a. Kecakapan Pengawas Partisipatif, indikator pencapaiannya peserta mampu mengevaluasi karakter diri dan membangun karakter yang sesuai dengan postur kader pengawasan partisipatif;
 - b. Membangun Integritas Diri (Etika & Moralitas), indikator pencapaiannya peserta mampu melakukan penilaian tentang integritas diri dan kelembagaan atau persoal pemangku kepentingan pemilu;
 - c. Kerelawanan, indikator pencapaiannya peserta memahami dan mampu melakukan pemetaan masyarakat sipil dalam peran serta untuk negara dan menempatkan diri sebagai kader pengawas partisipatif yang kompeten dan berintegritas;
7. Simulasi dan Penugasan
8. Pemilu dan Demokrasi-1
 - a. Regulasi Pemilu di Indonesia, indikator pencapaiannya peserta memahami desain regulasi pemilu legislatif dan eksekutif serta peserta memahami aktor, sistem pemilu dan tahapan penyelenggaraan pemilu di regulasi pemilu;
 - b. Standar Pemilu Demokratis, indikator pencapaiannya peserta memahami standar universal dari pemilu demokratis dan alat ukur dari *free and fair election*;
9. Pemilu dan Demokrasi-2
 - a. Jenis-Jenis Pelanggaran Pemilu, indikator pencapaiannya peserta memahami jenis-jenis pelanggaran pidana pemilu, jenis pelanggaran administrasi pemilu dan lembaga yang berwenang/memiliki fungsi menindak pelanggaran pemilu;
 - b. Simulasi Pelaksanaan Pemilu Luber & Jurdil
10. Pengawasan Partisipatif
 - a. Prinsip Dasar Pengawasan Partisipatif, indikator pencapaiannya peserta memahami paradigma pengawasan partisipatif, tujuan pengawasan partisipatif dan kode etik pengawasan partisipatif;
 - b. Mekanisme Kerja Pengawasan Partisipatif, indikator pencapaiannya peserta memahami tahapan-tahapan pemilu, proses dan mekanisme kerja pengawasan partisipatif, pelaporan hasil kerja pengawasan partisipatif;
 - c. Kolaborasi Pengawasan Partisipatif (Pemantau, Kampus, Ormas, OKP) Kerangka Kerja Pemantauan dan Laporan Pelanggaran, indikator pencapaiannya peserta memahami kerja-kerja jaringan, mampu membangun jaringan dan mampu bekerja dalam tim
 - d. Kerangka kerja (pemantauan) dan Laporan Pelanggaran, indikator pencapaiannya peserta memahami Cara membuat laporan pengawasan Proses dan mekanisme pelaporan cara mengawal hasil pelaporan;

11. Membangun Gerakan Pengawasan Partisipasi Publik

- a. Pemetaan Masalah, indikator pencapaiannya peserta memahami pentingnya pengawasan partisipatif dalam pemilu atau pemilihan (pilkada), mengetahui faktor-faktor penyebab masalah dalam pengawasan partisipatif, mampu menganalisis hubungan antar factor dalam masalah pengawasan partisipatif, dan mampu melakukan pemetaan masalah dalam diagram Pohon Masalah;
- b. Identifikasi Isu Strategis, indikator pencapaiannya peserta memahami peta masalah dalam pengawasan partisipatif, mampu mengidentifikasi isu-isu strategis terkait masalah pengawasan partisipatif dan mampu merumuskan isu strategis sebagai agenda perubahan;
- c. Analisis Stakeholders/Aktor, indikator pencapaiannya peserta mampu melakukan analisis aktor dalam masalah pemilu, serta hubungannya dengan pengawasan partisipatif, mampu mengidentifikasi peran ideal dan peran actual aktor, dan mampu merumuskan pendekatan untuk agenda perubahan terhadap aktor-aktor terkait;
- d. Strategi Membangun Jejaring & Komunitas, indikator pencapaiannya peserta memahami membangun jejaring untuk pengawasan partisipatif dalam pemilu, mampu melakukan pemetaan terhadap komunitas, memahami pendekatan dan aksi membangun komunitas;
- e. Strategi Advokasi, indikator pencapaiannya peserta mampu untuk memahami dan melakukan strategi advokasi pengawasan partisipatif dalam pemilu;

12. Komunikasi Massa-1

- a. Pengenalan Kerja Media, indikator pencapaiannya peserta memahami perbedaan antara media cetak, online, elektronik, memahami cara kerja wartawan masing-masing platform media tersebut dan memahami UU tentang Pers dan Kode Etik Wartawan, memahami perbedaan yang disebut berita hardnews, feature dan breaking news.
- b. Jurnalisme Warga, indikator pencapaiannya peserta memahami apa yang disebut jurnalisme warga, memahami kelebihan jurnalisme warga dan jurnalisme profesional yang diatur UU dan memahami risiko dari jurnalisme warga.
- c. Media Sosial untuk Pengawasan Partisipatif, indikator pencapaiannya peserta cara media social, pentingnya media sosial untuk pengawasan partisipatif dan mampu memanfaatkannya untuk pengawasan partisipatif

13. Komunikasi Massa-2

- a. Penulisan efektif, indikator pencapaiannya peserta memahami yang disebut penulisan laporan efektif, memahami unsur-unsur penulisan laporan efektif dan mampu membuat laporan laporan efektif
- b. Teknik Komunikasi Massa, indikator pencapaiannya peserta memahami arti dan makna komunikasi, memahami pentingnya komunikasi massa,

memahami syarat-syarat tercapainya tujuan komunikasi dan mampu mempraktikkan teknik komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

14. Pengisian Post-Tes (sebanyak 10 soal, merupakan soal yang sama dengan soal pre test) dan Evaluasi Pelatihan, indikator pencapaiannya peserta memahami konsep dasar dan tujuan evaluasi pelatihan dan diperoleh gambaran tingkat penyerapan materi oleh peserta
15. Rencana Tindak Lanjut dan Pembentukan Komunitas, indikator pencapaiannya memahami tujuan agenda pasca pelatihan, dan memahami prinsip dan tujuan review pelatihan.

2.4 Narasumber dan Fasilitator SKPP Tingkat Menengah

Narasumber pada SKPP Menengah terdiri dari narasumber internal (Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan/atau Bawaslu Kabupaten Karawang sebagai tuan rumah), serta narasumber eksternal. Penentuan narasumber eksternal menjadi tanggungjawab Bawaslu Provinsi Jawa Barat Adapun narasumber eksternal tersebut adalah :

- a. Alwan Ola Riantoby (Koordinator Nasional JPPR), mengisi materi Seminar Penguatan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum”;
- b. Erik Kurniawan (Sindikasi Pemilu dan Demokrasi), mengisi materi Pembangunan Karakter;
- c. Wawan Gunawan, M.Ud (Akademisi/Dosen/Jaringan Advokasi Jawa Barat (JAJ), mengisi materi Komunikasi Masa 1;
- d. Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si (Akademisi/Dosen/Penulis/Kolumnis), mengisi materi Komunikasi Massa 2.

Sedangkan fasilitator pada kegiatan SKPP Menengah berasal dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat yaitu pada hari pertama sampai hari ketiga (11-13 Oktober 2021) oleh Ridwan Raharja dan Ahmad Wari sedangkan pada hari ketiga dan keempat (14-15 Oktober 2021) oleh Agus Djaelani dan Iji Jaelani.

Narasumber dan fasilitator bertugas dan bertanggung jawab pada penentuan metode pelatihan yang digunakan yaitu dengan pendekatan andragogi. Pendekatan andragogi sebagai metode pelatihan didasarkan pada kriteria peserta dimana peserta merupakan orang-orang berusia dewasa dan dianggap memiliki pengalaman yang berbeda-beda dan dapat menjadi sumber informasi dalam pelatihan ini. Pola pendekatan andragogi juga dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif, yaitu: keterbukaan, kesetaraan, dan kebersamaan. Penyampain materi dilakukan dengan cara dialog (tidak monoton), sehingga peserta tidak jenuh dan sekaligus dapat menjadi parameter bagi narasumber sampai sejauh mana peserta dapat memahami isi materi yang sedang dibahas.

Berbagai metode digunakan dalam pembelajaran, meliputi:

- (1) Ceramah,
- (2) *Brainstorming* atau curah pendapat,
- (3) Tanya jawab,
- (4) Diskusi kelompok,
- (5) Simulasi,
- (6) Penugasan
- (7) Review Materi

2.5 PENILAIAN

Format penilaian peserta pada SKPP Menengah sama dengan format penilaian pada SKPP Dasar yakni terdiri dari penilaian Pre test, post test, penilaian materi setiap sesi, penilaian Rencana Tindaklanjut dan penilaian kedisiplinan (disiplin dalam waktu, berpakaian dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan/materi tanpa terkecuali). Penilaian tersebut menjadi salah satu rekomendasi peserta untuk melanjutkan ke SKPP Tingkat Lanjut selain proporsionalitas dan keterwakilan perempuan. Penilaian peserta dilakukan oleh PJ penilaian Bawaslu Provinsi Jawa Barat yaitu Ayung Miranti pada hari pertama sampai hari ketiga (11-13 Oktober 2021) dan Teguh Rianto pada hari keempat dan kelima (14-15 Oktober 2021).

2.6 PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SKPP TINGKAT MENENGAH DI JAWA BARAT

Pelaksanaan SKPP Tingkat Menengah di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan selama 5 hari yaitu pada tanggal 11-15 Oktober Tahun 2021 (Senin s.d Jumat) bertempat di Hotel Swissbel-inn Kab. Karawang. Tim Bawaslu Provinsi yang bertugas membantu proses pelaksanaan SKPP Menengah dibagi menjadi 2 (dua) tim, yaitu tim 1 dan tim 2. Untuk pelaksanaan SKPP Tingkat Menengah pada tanggal 11-13 Oktober 2021 dibantu oleh Tim 1 (satu) yang terdiri dari Satrio Nugroho, Ridwan Raharja, Ahmad Wari, Ayung Miranti dan Irfan Patturohman sedangkan pada tanggal 14-15 tim yang membantu pelaksanaan pada pelaksanaan SKPP Tingkat Menengah adalah Tim 2 (dua) yakni: Satrio Nugroho, Andhika Pratama, Agustine Wibiana, Agus Djaelani, Iji Jaelani dan Teguh Rianto Bukit.

Sama seperti SKPP Dasar, SKPP Menengah di Provinsi Jawa Barat diikuti oleh 14 Kabupaten/kota terpilih yakni :

- 1) Kabupaten Cirebon
- 2) Kabupaten Indramayu
- 3) Kota Bandung
- 4) Kabupaten Cianjur
- 5) Kota Tasikmalaya
- 6) Kabupaten Sumedang
- 7) Kabupaten Bekasi
- 8) Kota Cimahi

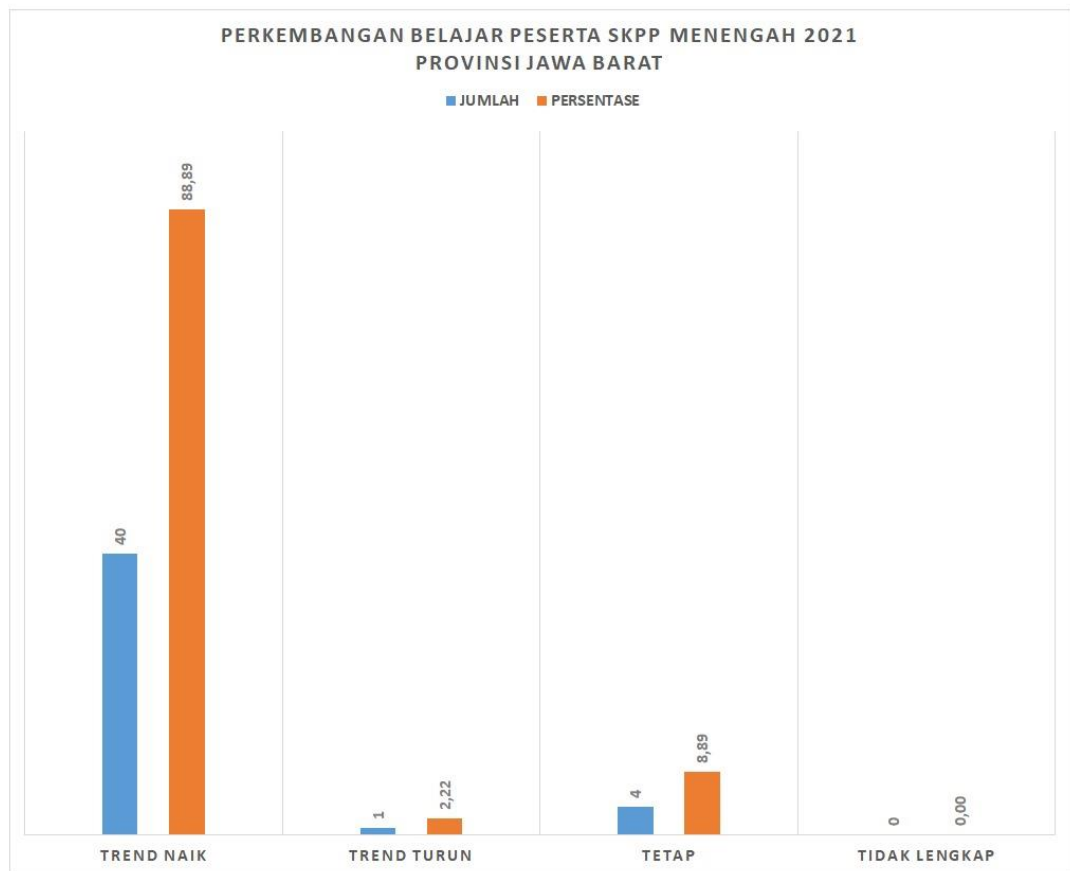
- 9) Kabupaten Sukabumi
- 10) Kota Bogor
- 11) Kabupaten Garut
- 12) Kabupaten Subang
- 13) Kabupaten Bandung, dan
- 14) Kabupaten Bogor.

Pada H-1 sebelum pelaksanaan kegiatan Tim 1 (satu) Bawaslu Provinsi Jawa Barat bersama Bawaslu Kabupaten Karawang sebagai tuan rumah mengadakan rapat teknis pelaksanaan baik secara langsung di tempat lokasi SKPP. Mekanisme pelaksanaan SKPP Menengah kegiatannya baik dari fasilitasi dan kepanitiaan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat, adapun Bawaslu RI hanya melakukan supervisi dan pimpinan Bawaslu RI menyampaikan arahan baik saat pembukaan, saat SKPP Menengah berlangsung atau pada saat penutupan.

Seluruh peserta hadir lengkap dan melakukan tes swab/tes usap sebelum memasuki ruangan dan menunggu hasil. Adapun peserta yang dinyatakan positif Covid-19 segera dipulangkan tanpa mengurangi hak administrasinya. Setelah dinyatakan negatif peserta dipersilahkan masuk dengan sebelumnya melakukan registrasi dengan menyerahkan persyaratan yang telah diinformasikan sebelumnya di dalam surat undangan yaitu CV, surat pernyataan kesediaan mengikuti kegiatan sampai selesai dan foto 3x4 sebanyak 3 lembar. Peserta yang telah menyerahkan persyaratan mendapatkan masker dan *id card*.

Seluruh peserta bergabung ke dalam WAG (*whatsapp Group*) untuk berdiskusi dan berkoordinasi selama kegiatan dan pasca kegiatan, WAG (*whatsapp Group*) tersebut juga sebagai kontrol terhadap Rencana Tindaklanjut yang dilakukan oleh peserta dan upaya untuk merawat peserta/kader.

Selanjutnya peserta memulai kegiatan sesuai *rundown* (terlampir) yakni Seminar, *pre-test*, pembukaan, sesi materi sampai dengan penutupan. *Pre-test* dan *post test* dimaksudkan untuk mengukur kemampuan peserta sebelum dan sesudah pembelajaran SKPP. Sehingga setiap peserta akan terlihat perubahan pada peningkatan kemampuannya. Soal yang tersedia dalam *pre-test* dan *post-test* sebanyak 10 soal. Soal pretes dan *post tes* adalah soal yang sama. Peningkatan pemahaman peserta mengenai kepemiluan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



| | JUMLAH | PERSENTASE |
|---------------|--------|------------|
| TREND NAIK | 40 | 88,89 |
| TREND TURUN | 1 | 2,22 |
| TETAP | 4 | 8,89 |
| TIDAK LENGKAP | 0 | 0,00 |

Peserta yang memiliki peningkatan dari *pre test* ke *post tes* sebanyak 40 orang, peserta yang nilainya turun 1 orang atas nama Akbar Afrainsyah dari Kab. Cianjur dan peserta yang nilainya tetap sebanyak 4 (empat) orang yaitu Rajab Ahirullah dari Kab. Bogor, Rikas Firdaus dari Kab. Bekasi, Resa Noelsa dari Kab. Bandung dan Zayyuna Bithorqi dari Kota Tasikmalaya.

Pembukaan dimulai pada pukul 14.00 wib bergeser 1 jam dari *rundown* yang seharusnya dimulai pukul 13.00 wib. Kegiatan SKPP Menengah secara resmi dibuka oleh Ketua Bawaslu RI, Bapak Abhan. Pembukaan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Karawang serta 14 Koordinator Divisi PHL yang mengantarkan peserta SKPP Menengah.

Seluruh pembelajaran disampaikan secara langsung/ tatap muka tidak melalui daring. Terdapat narasumber yang dipanel antara lain pada materi Seminar narasumber Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bapak Zaki Hilmi dipanel dengan narasumber eksternal, Bapak Alwan Ola Riantoby. Pada materi Pembangunan Karakter narasumber Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bapak Yulianto dipanel bersama narasumber eksternal, Bapak Erik Kurniawan dan pada materi Pemilu dan Demokrasi 2 narasumber Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bapak Sutarno dipanel bersama narasumber Bawaslu Kab. Karawang, Bapak Robi Rubiat Machri.

Forum sangat berdinamika, peserta aktif dan antusias terhadap pembelajaran. Masing-masing peserta memiliki daya analisa yang kuat dan terlibat dalam diskusi. Tidak ada satu sesi pun yang luput dari pertanyaan peserta. Setiap

akhir sesi diakhiri dengan foto bersama dan penugasan kelompok maupun individu. Pada awal pagi pembelajaran diawali dengan senam pagi yang di pimpin dari oleh perwakilan peserta yang berbeda setiap harinya dilanjutkan dengan review materi hari sebelumnya.

Sebuah kehormatan juga bagi Bawaslu Provinsi Jawa Barat karena selain dihadiri oleh Ketua Bawaslu RI Pada hari kamis tanggal 14 Oktober 2021, Pimpinan Bawaslu RI, Bapak Rahmat Bagja turut hadir menyampaikan kuliah umum kepada peserta SKPP Menengah dengan pokok bahasan pemilihan umum, keterwakilan perempuan dalam pemerintahan, negara dan pemerintahan, analisis sosial dan manajemen risiko dalam memilih wakil rakyat.

Pada penyusunan Rencana Tindak Lanjut, peserta membuat Rencana Tindak Lanjut secara beragam baik secara kelompok asal daerah dan Rencana Tindak Lanjut yang dilaksanakan oleh individu. Rencana tindaklanjut ini merupakan agenda pasca pembelajaran dimana peserta membangun simpul-simpul pengawasan di komunitasnya. Membangun komunitas basis menjadi sebuah materi yang tidak kalah pentingnya yang nantinya dapat menjadi media sosialisasi pengawasan pemilu sekaligus menciptakan atmosfer pengawasan partisipatif. Yang dimaksudkan membangun komunitas basis ini merujuk sebagai komunitas basis pengawasan. Dimungkinkan membangun komunitas baru atau dapat juga memaksimalkan komunitas dalam masyarakat yang sudah terbentuk menjadi media pengawasan partisipatif. Rencana tindaklanjut memuat:

- a. Nama Kader/Kelompok
- b. Nama Kegiatan
- c. Tujuan Kegiatan
- d. Sasaran Kegiatan
- e. Metode Kegiatan
- f. Waktu Pelaksanaan

Penyusunan rencana tindaklanjut dipandu oleh fasilitator, Agus Djaelani dan Iji Jaelani. Adapun rencana tindaklanjut peserta SKPP Menengah dapat dilihat (*terlampir*).

C. PENCANANGAN KAMPUNG PENGAWASAN PARTISIPATIF

Kegiatan Pencanaan Kampung Pengawasan Tahun 2021 dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu Pemilu dan Pilkada. Adapun tujuan dari Kegiatan Pencanaan Kampung Pengawasan Partisipatif Tahun 2021 adalah :

- 1) **Meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat**, diharapkan adanya kampung pengawasan akan semakin banyak pihak yang mengetahui tugas, pokok dan fungsi pengawasan Pemilu dan Pilkada sehingga jumlah Masyarakat yang terlibat dalam proses Pemilu semakin meningkat.

- 2) **Sarana pendidikan Pemilu dan Pilkada bagi masyarakat**, diharapkan adanya pengembangan kampung pengawasan ada fasilitas yang baik dan optimal yang menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melakukan pengawasan partisipatif.
- 3) **Upaya merawat dan menindaklanjuti kerjasama dengan desa/kampung pengawasan**, diharapkan kegiatan ini akan mendorong desa untuk kembali melakukan upaya-upaya memberikan informasi dan edukasi tentang demokrasi yang baik dalam Pilkada ataupun Pemilu kepada warganya.

Adapun kegiatan prioritas nasional yang dilaksanakan dalam bentuk Pencanaan Kampung Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebanyak 4 (empat) kegiatan dalam lokasi yang berbeda, yaitu: Pencanaan Kampung Pengawasan di Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Cianjur.

1. Pencanaan Kampung Pengawasan di Kabupaten Bandung

Kegiatan Pencanaan Kampung Pengawasan Partisipatif Tahun 2021 dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, bertempat di Kp. Pasantren Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Peserta Rapat Kegiatan Pencanaan Kampung Pengawasan Partisipatif Tahun 2021 terdiri dari :

| No | Nama Peserta | Jumlah |
|----|---------------------------|--------|
| 1. | Pesantren Fathul Muin | 10 |
| 2. | Pesantren Miftahul Anwar | 5 |
| 3. | PR NU Cimekar | 5 |
| 4. | PR GP Ansor Cimekar | 5 |
| 5. | PR IPNU Cimekar | 5 |
| 6. | Karang Taruna Cimekar | 5 |
| 7. | Pengurus RW Kp. Pasantren | 5 |
| 8. | Pengurus RT Kp. Pasantren | 5 |
| 9. | Perangkat Desa Cimekar | 5 |
| | Jumlah | 50 |

Narasumber dalam kegiatan tersebut terdiri dari:

- a. Bapak Zaki Hilmi (Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat);
- b. Bapak Hedi Ardia (Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung);
- c. Bapak Deni Ahmad Haedari (Tokoh Masyarakat Jawa Barat)

Metode yang digunakan dalam Pencanaan Kampung Pengawasan Partisipatif Tahun 2021 adalah metode ceramah/presentasi materi oleh Narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan peserta.

Rangkaian kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Prakata oleh Kepala Desa Cimekar
2. Sambutan Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung
3. Sambutan Pembukaan oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat
4. Penyerahan Buku Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat kepada Pimpinan Pondok Pesantren Fathul Muin.
5. Paparan Materi dari Narasumber Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung dengan materi: “Bentuk-Bentuk Pengawasan Partisipatif Masyarakat dalam Demokrasi”
6. Paparan Materi dari Narasumber Bapak Deni Ahmad Haedari dengan materi: “Peran Pesantren dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis”.
7. Sesi Tanya – Jawab
8. Penutup

2. Pencanaan Kampung Pengawasan di Kabupaten Indramayu

Kegiatan Pencanaan Kampung Pengawasan Partisipatif Tahun 2021 dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 6 November 2021, bertempat di Balai Desa Rambatan Wetan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu.

Peserta Rapat Kegiatan Pencanaan Kampung Pengawasan Partisipatif Tahun 2021 terdiri dari perangkat desa, karang taruna, pengurus RT, dan pengurus RW Se-Desa Rambatan Wetan dengan total 50 peserta dengan rincian sebagai berikut.

| No | Nama Peserta | Jumlah |
|----|-----------------|--------|
| 1. | Pengurus RT | 19 |
| 2. | Pengurus RW | 19 |
| 2. | Karang Taruna | 5 |
| 3. | Perangkat Desa: | 7 |
| | Jumlah | 50 |

Narasumber dalam kegiatan tersebut terdiri dari:

- a. Bapak Drs. H.M Wasikin Marzuki (Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat);
- b. Bapak Supriadi (Anggota Bawaslu Kabupaten Indramayu);
- c. Bapak Bakhrul Amal (akademisi)
- d. Bapak Wartono, S.Pd., M.Si. (Kuwu Desa Majasari)

Metode yang digunakan dalam Pencanaan Kampung Pengawasan Partisipatif Tahun 2021 adalah metode ceramah/presentasi materi oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan peserta.

Rangkaian kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Prakata oleh Kepala Desa Rambatan Wetan
2. Sambutan Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu
3. Sambutan Pembukaan oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat
4. Penyerahan Buku Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat kepada Kepala Desa Rambatan Wetan
5. Paparan Materi dari Narasumber Bapak Bakhrul Amal (akademisi)
6. Paparan Materi dari Narasumber Bapak Wartono (Kuwu Desa Majasari/APDESI)
7. Sesi Tanya Jawab
8. Penutupan

3. Pencanaan Kampung Pengawasan di Kabupaten Subang

Kegiatan Pencanaan Kampung Pengawasan Partisipatif Tahun 2021 dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, bertempat di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Kabupaten Subang. Peserta Rapat Kegiatan Pencanaan Kampung Pengawasan Partisipatif Tahun 2021 terdiri dari perangkat desa, karang taruna, pengurus RT, dan pengurus RW Se-Desa Binong Kecamatan Binong Kabupaten Subang dengan total 50 peserta.

Narasumber dalam kegiatan tersebut terdiri dari:

1. Bapak Zaki Hilmi (Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat);
2. Bapak Immanudin (Anggota Bawaslu Kabupaten Subang);
3. Bapak KH. Abdul Hadi Mutholib (MUI Kecamatan Binong)
4. Bapak Yosep Yusdiana (Pemerhati Politik Jawa Barat)

Metode yang digunakan dalam Pencanaan Kampung Pengawasan Partisipatif Tahun 2021 adalah metode ceramah/presentasi materi oleh Narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan peserta. Rangkaian kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Prakata oleh Kepala Desa Binong
2. Sambutan Ketua Bawaslu Kabupaten Subang
3. Sambutan Pembukaan oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat
4. Penyerahan Buku Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat kepada Kepala Desa Binong
5. Paparan Materi dari Narasumber Bapak KH. Abdul Hadi Mutholib (MUI Kecamatan Binong)
6. Paparan Materi dari Narasumber Bapak Yosep Yusdiana (Pemerhati Politik Jawa Barat)
7. Sesi Tanya Jawab
8. Penutup

4. Pencanaan Kampung Pengawasan di Kabupaten Cianjur

Kegiatan Pencanaan Kampung Pengawasan Partisipatif Tahun 2021 dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 27 November 2021, bertempat di Desa Batu Lawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.

Peserta Rapat Kegiatan Pencanaan Kampung Pengawasan Partisipatif Tahun 2021 terdiri dari PR Ansor Batulawang, pemuda desa Batulawang, pesantren joglo, tokoh masyarakat desa Batulawang, tokoh agama desa Batulawang, kelompok tani desa Batulawang, kelompok tani desa Batulawang, pengurus ranting NU Batulawang, perangkat desa Batulawang, serta PC Ansor desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur dengan total 50 peserta.

Narasumber dalam kegiatan tersebut terdiri dari:

1. Ibu Lolly Suhenty (Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat);
2. Bapak Usep Agus Zawari (Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur);
3. Bapak Ariful Holiq Zaelani (Tokoh Agama Kabupaten Cianjur);
4. Bapak Deni Ahmad Haedar (Ketua GP Ansor Jawa Barat).

Metode yang digunakan dalam Pencanaan Kampung Pengawasan Partisipatif Tahun 2021 adalah metode ceramah/presentasi materi oleh Narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan peserta. Rangkaian kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Sambutan Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur
2. Sambutan Pembukaan oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat
3. Penyerahan Buku Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Kepada Kepala Desa Batulawang
4. Paparan Materi dari Narasumber Bapak Ariful Holiq Zaelani (Tokoh Agama Kabupaten Cianjur)
5. Paparan Materi dari Narasumber Deni Ahmad Haedar (Ketua GP Ansor Jawa Barat)
6. Sesi Tanya Jawab
7. Penutup

D. SOSIALISASI PENDIDIKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN AKADEMIK

Sosialisasi Pendidikan Pengawasan di Lingkungan Akademik merupakan kegiatan Prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebanyak 4 (empat) kegiatan dalam lokasi yang berbeda, yaitu : Sosialisasi Pendidikan Pengawasan di Lingkungan Akademik di Universitas Sebelas April (UNSA) Kabupaten Sumedang, Universitas Siliwangi (UNSIL) Kota Tasikmalaya, Universitas Djuanda Kabupaten Bogor dan Universitas Wiralodra (UNWIR) Kabupaten Indramayu. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan di Lingkungan Akademik bertujuan untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat khususnya civitas akademika dan meningkatkan peran perguruan tinggi dalam pemilu dan pemilihan.

Kampus yang merupakan kawah candradimuka SDM yang berkualitas dimana mahasiswa merupakan *agent of change*. Dengan diadakannya sosialisasi di lingkungan akademik ini juga berharap akan ditindaklanjuti dalam bentuk MoU.

1. Universitas Sebelas April Sumedang (UNSAF)

Kegiatan Sosialisasi pendidikan pengawasan di Universitas April Sumedang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2021 bertempat di Universitas Sebelas April Sumedang yang dihadiri oleh Rektor Universitas Sebelas April, Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Bapak Zaki Hilmi), Rektor (Bapak Dr. H. Aripin, S.H., M.Pd), Wakil Rektor III (Bapak Dr. Kuswara, M.Pd) dan Wakil Dekan III (Ibu Irma Hermayanti, S.Pd., M.Si), narasumber expert (Bapak akadun), ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Sumedang, jajaran sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kab. Sumedang. Peserta kegiatan sebanyak 50 orang mahasiswa Universitas Sebelas April Sumedang. Metode yang digunakan adalah metode ceramah/presentasi materi oleh Narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan peserta. Rangkaian kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Sambutan Rektor Universitas Sebelas April
2. Sambutan Pembukaan oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Zaki Hilmi)
3. Penyerahan Buku Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Kepada Rektor Universitas Sebelas April
4. Paparan Materi dari Narasumber Dr. Dadang Priyatna, M.Si (Anggpta Bawaslu Kab.Sumedang)
5. Paparan Materi dari Narasumber DR. Akadun, M.Pd (Kepala Penjamin Mutu Universitas Sebelas April Sumedang)
6. Sesi Tanya Jawab
7. Penutup

2. Universitas Djuanda Bogor

Kegiatan Sosialisasi pendidikan pengawasan di Universitas Djuanda Bogor dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021 bertempat di Universitas Djanda Kab. Bogor yang dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Zaki Hilmi), Rektor Universitas Djuanda (Dr. Ir. Dede Kardaya, M.Si), Wakil Dekan II Fisip (Gotfridus Garis Seran), jajaran dosen, Ketua dan anggota Bawaslu Kab. Bogor, jajaran sekretariat Bawaslu provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kab. Bogor dan narasumber expert (Ahsanul Minan). Peserta kegiatan sebanyak 50 orang yang terdiri dari mahasiswa dan tenaga pendidik Universitas Djuanda. Metode yang digunakan adalah metode ceramah/presentasi materi oleh Narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan peserta. Kegiatan sosialisasi ini sekaligus dengan diadakannya penandatanganan MoU antara Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan Universitas Djuanda. Rangkaian kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Sambutan Ketua Bawaslu Kab. Bogor
2. Sambutan Rektor Universitas Djuanda
3. Sambutan pembukaan oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Bapak Zaki Hilmi)
4. Penandatanganan MoU antara Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan Universitas Djuanda
5. Penyerahan plakat
6. Paparan materi dari narasumber Burhanudin (Anggota Bawaslu Kab.Bogor)
7. Paparan materi dari narasumber Ahsanul Minan (Dosen UNUSIA)
8. Sesi Tanya Jawab
9. Penutup

3. Universitas Siliwangi (UNSIL) Kota Tasikmalaya

Kegiatan sosialisasi pendidikan pengawasan di Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya dilaksanakan pada tanggal 18 November 2021 bertempat di kampus Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya yang dihadiri oleh Dekan FISIP Universitas Siliwangi (Prof. Dr. H. Iis Marwan, S.H., M.Pd), Ketua Jurusan Ilmu Politik Universitas Siliwangi (Wiwi Widiastuti, S.IP., M.Si), jajaran dosen, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tasikmalaya, jajaran sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kota Tasikmalaya. Peserta kegiatan sebanyak 50 orang terdiri dari mahasiswa dan tenaga pendidik Universitas Siliwangi. Metode yang digunakan adalah metode ceramah/presentasi materi oleh Narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan peserta. Rangkaian kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Sambutan Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya atau yang mewakili
2. Sambutan Rektor Universitas Siliwangi atau yang mewakili
3. Sambutan Pembukaan oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Bapak Wasikin Marzuki)
4. Paparan Materi dari Narasumber Ijang Jamaludin (Anggota Bawaslu Kota Tasikmalaya)
5. Paparan Materi dari Narasumber Wiwi Widiastuti (Dosen UNUSIA)
6. Sesi Tanya Jawab
7. Penutup

4. Universitas Wiralodra Kabupaten Indramayu

Kegiatan Sosialisasi pendidikan pengawasan di Universitas Wiralodra dilaksanakan pada tanggal 8 November 2021 bertempat di Universitas Wiralodra Indramayu yang dihadiri oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat (H. Yusup Jurnia, S.IP), Rektor Universitas Wiralodra (Dr. Ujang Suratno, Sh., M.Si), Dekan Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Jajaran Dosen, ketua dan

anggota Bawaslu Kab. Indramayu, Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Indramayu.

Peserta kegiatan sebanyak 50 orang mahasiswa dan tenaga pendidik Universitas Wiralodra Indramayu. Metode yang digunakan adalah metode ceramah/presentasi materi oleh Narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan peserta. Rangkaian kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Sambutan Rektor Universitas Wiralodra
2. Sambutan pembukaan oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat (H. Yusup Kurnia)
3. Penyerahan Buku Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Kepada Rektor Universitas Wiralodra
4. Paparan materi dari narasumber Supriadi (Anggota Bawaslu Kab.Sumedang)
5. Paparan materi dari narasumber Samsul (Dekan Hukum Universitas Wiralodra)
6. Sesi Tanya Jawab
7. Penutup

E. WEBINAR POJOK PENGAWASAN

Program prioritas nasional yang lain yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah Webinar Pojok Pengawasan yang dilaksanakan sebanyak 4 (tiga) kali kegiatan, yaitu Webinar Bedah Buku “Spiritualitas Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Webinar Bersama Penyandang Disabilitas, Webinar Peran Perempuan dalam Pemilu 2024: Evaluasi dan Proyeksi dan Webinar Partisipasi Civitas Akademika dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

1. Webinar Pojok Pengawasan Bedah Buku “Spiritualitas Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Webinar Pojok Pengawasan Bedah Buku “Spiritualitas Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dilaksanakan pada tanggal 9 November 2021 dimulai pukul 09.00 wib s.d selesai dengan narasumber Arif Ma’ruf Suha (Penulis Buku), Dr. Nur Hidayat Sardini, S.sos., M.Si (akademisi), Abdullah (ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat) juga Koordinator Divisi PHL (Zaki Hilmi) yang memberikan sambutan. Peserta yang memasuki zoom beragam terdiri dari berbagai kalangan, dosen, mahasiswa, jajaran pengawas pemilu provinsi jawa barat, pengawas pemilu kab/kota di wilayah jawa barat dan jajaran pengawas pemilu di luar Provinsi Jawa Barat dan kader SKPP Jawa Barat.

2. Webinar Pojok Pengawasan Bersama Penyandang Disabilitas

Webinar bersama penyandang disabilitas dilaksanakan pada tanggal 23 November 2021 pukul 13.00 wib s.d selesai. Narasumber pada webinar tersebut

adalah Ray Rangkuti (Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia), Norman Yulian (Ketua PPDI Jawa Barat) dan Koordinator Divisi PHL Provinsi Jawa Barat (Zaki Hilmi) yang membuka secara resmi webinar tersebut. Peserta yang memasuki zoom beragam terdiri dari kelompok penyandang disabilitas yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Bawaslu Kab/Kota dan kader SKPP Jawa Barat.

3. Webinar Pojok Peran Perempuan Dalam Pemilu 2024: Evaluasi dan Proyeksi

Webinar bersama perempuan dengan tema Peran Perempuan Dalam Pemilu 2024: Evaluasi dan Proyeksi dilaksanakan pada 25 November 2021 pukul 13.00 wib s.d selesai. Narasumber pada webinar tersebut adalah Nurlia Dian P, S.IP., MA (Koordinator Nasional JPPR) dan Maya Muizatil Lutfillah (Ketua KOPRI PB PMII), webinar dibuka secara resmi oleh Koordinator Divisi PHL (Bapak Zaki Hilmi). Peserta yang bergabung zoom terdiri dari Kader SKPP, organisasi perempuan KOPRI PMII, Bawaslu Kab/Kota.

4. Webinar Pojok Pengawasan Partisipasi Civitas Akademika Dalam Pemilihan Umum Serentak 2024

Webinar bersama civitas akademika dilaksanakan pada tanggal 30 November 2021 pada pukul 13.00 wib s.d selesai. Narasumber pada webinar tersebut Dra. Mudiwati Rahmatunnisa, MA., Ph.D., dan Jay Akhmad (Koordinator Seknas JGD). Webinar dibuka secara resmi oleh Koordinator Divisi PHL (Bapak Zaki Hilmi). Peserta yang bergabung zoom terdiri dari Mahasiswa Universitas Padjadjaran, jajaran dosen, kader SKPP Jawa Barat, dan Bawaslu Kab/Kota.

F. Podcast Pandangan Demokrasi Milenial (PANDEMI)

Podcast PANDEMI merupakan kegiatan diskusi publik yang melibatkan milenial sebagai narasumber. Diskusi publik dengan tajuk “Demokrasi Perspektif Millennial Tahun 2021” bertujuan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, serta optimalisasi tugas dan fungsi Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu partisipatif. Kegiatan diskusi publik ini dilaksanakan menggunakan teknik perekaman dan disiarkan melalui akun Youtube Bawaslu Jabar oleh Tim Humas Bawaslu Jabar dalam istilah kekinian bernama Podcast.

Pada setiap pelaksanaan Diskusi Publik Pengawasan Pemilu menghadirkan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat sekaligus Koordinator Divisi Pengawasan menjadi *Keynote Speaker* pada saat pembukaan kegiatan. Diskusi dipandu oleh seorang Host dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Durasi waktu Podcast selama 40 menit, yang terbagi kedalam beberapa segmen yakni :

- a. *Opening Ceremony* oleh *Keynote Speaker* selama 5 menit, dilanjutkan dengan pengenalan singkat profil narasumber selama 5 menit dalam bentuk tayangan audio visual;
- b. pertanyaan prolog dengan durasi waktu masing-masing narasumber dapat menjawab pertanyaan Host selama 5 menit;
- c. Host mengajukan pertanyaan penajaman kepada kedua narasumber
- d. 10 menit Keempat : Closing Statement dari masing-masing narasumber.

Podcast PANDEMI dilaksanakan dua kali yakni dengan tajuk yang sama “Demokrasi Perspektif Millenial Tahun 2021” pada:

1. Pada tanggal 24 Maret 2021 pukul 14.00 WIB di Kantor Bawaslu provinsi Jawa Barat dengan menghadirkan narasumber secara langsung yaitu Deni Safrudin (Ketua DPD IMM Jawa Barat) dan Andreas (Ketua GMKI Jawa Barat).
2. Pada tanggal 08 April 2021 pukul 09.00 wib di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan menghadirkan narasumber secara langsung yaitu Khoirul Anam (Ketua Badko HMI) dan Ravindra (Ketua Hikmahbudhi).

G. Tadarus Pengawasan Pemilu

Kegiatan Tadarus Pengawasan Pemilu dilaksanakan pada 19 April 2021 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Baat pada pukul 15.00 dihadiri oleh Anggota Bawaslu RI, Bapak M. Affifudin, ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat beserta jajaran sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Adapun peserta yang diundang adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat dan Kota Cimahi Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan edukasi kepada publik tentang pengawasan pemilu dan membumikan peran pengawasan untuk keadilan Pemilu. Tadarus pengawasan pemilu juga diartikan sebagai kegiatan untuk ramah tamah kelembagaan dan berdiskusi.

H. Kerjasama Pengawasan Partisipatif

Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam penguatan kelembagaan dan kemitraan melaksanakan kerja sama dengan *stakeholder-stakholder* dengan melaksanakan MoU (nota kesepahaman) dan MoA (nota kesepakatan). Daftar kerja sama antar lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 :

A. Sudah Melakukan Penandatanganan:

1. MoU Antara Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang dengan Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Tentang : Program Merdeka Belajar dan Pengawasan Partisipatif Melalui Tridharma Perguruan Tinggi

Jangka Waktu MoU : 2 Tahun
Lokasi penandatanganan : dilakukan secara *desk to desk*
Tanggal penandatanganan : 1 November 2021

2. MoA Antara Fakultas Hukum Universitas Pasndan Bandung dengan Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Tentang : Pengawasan Partisipatif Melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Jangka Waktu MoU : 3 tahun
Lokasi penandatanganan : Universitas Pasundan, Bandung. Dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Tanggal penandatanganan : 1 Desember 2021

3. MoU Antara Universitas Wiralodra Indramayu dengan Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Tentang : Pengawasan Partisipatif Melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Jangka Waktu MoU : 3 tahun
Lokasi penandatanganan : Universitas Wiralodra, Indramayu. Dihadiri oleh Bapak H. Yusuf Kurnia (Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat), namun penandatanganan antara Rektor Universitas Wiralodra dengan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat dilakukan secara *desk to desk*
Tanggal penandatanganan : 7 Desember 2021

B. Sedang Dalam Proses/Menunggu Penandatanganan:

1. MoU Antara STMIK Rosma Karawang dengan Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Tentang : Pengawasan Partisipatif Melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Jangka Waktu MoU : 3 tahun
Lokasi penandatanganan : Akan dilakukan secara *desk to desk*

2. MoU Antara UBSI Karawang dengan Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Tentang : Pengawasan Partisipatif Melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Jangka Waktu MoU : 3 tahun
Lokasi penandatanganan : Akan ditentukan kemudian

3. MoU Antara Stikes Horizon Karawang dengan Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Tentang : Pengawasan Partisipatif Melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Jangka Waktu MoU : 3 tahun

Lokasi penandatanganan : Akan ditentukan kemudian

4. MoU Antara Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Bogor dengan Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Tentang : Pengawasan Partisipatif Melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Jangka Waktu MoU : 2 tahun

Lokasi penandatanganan : Direncanakan di Bogor, awal tahun 2022

5. MoU Antara Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan OKP Anggota Cipayang Plus (PMII Jabar, PMK Jabar, KAMMI Jabar, KMHDI Jabar, PMKRI Kota Bandung, IMM Jabar, dan Hikmahbudhi Kota Bandung)

Tentang : Pengawasan Partisipatif Melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Jangka Waktu MoU : 3 tahun

Lokasi penandatanganan : Direncanakan di Bawaslu Provinsi Jawa Barat, awal tahun 2022

6. MoA Antara Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung dengan Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Tentang : Program Merdeka Belajar dan Pengawasan Partisipatif Melalui Tridharma Perguruan Tinggi

Jangka Waktu MoU : 2 tahun

Lokasi penandatanganan : Akan ditentukan kemudian, direncanakan awal tahun 2022

I. Optimalisasi dan Integrasi Hubungan Antar Lembaga

Kegiatan optimalisasi dan integrasi hubungan antar lembaga dilaksanakan pada tanggal 16 November 2021 pada pukul 09.00 wib, bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat dan mengoptimalkan program-program hubungan antar lembaga di Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sekaligus menjadi evaluasi kinerja hubungan antar lembaga di masing-masing Bawaslu kab/kota. Peserta yang diundang adalah Koordinator Divisi PHL dan staf PHL se-Jawa Barat, total peserta sebanyak 54 orang. Adapun narasumber pada kegiatan tersebut adalah Tenaga Ahli Bawaslu RI

yakni Masykurudin Hafidz dan acara dibuka oleh Koordinator Divisi PHL Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bapak Zaki Hilmi. Tidak hanya pemaparan dan diskusi tetapi diadakan pula pemberian penghargaan kepada Bawaslu kabkota dalam kinerja hubungan antar lembaga yang telah dilaksanakan selama tahun 2021, diantaranya:

A. Hubal Terbaik yang diraih oleh :

- Peringkat 1 : Bawaslu kab. Bandung
- Peringkat 2 : Bawaslu Kab. Garut
- Peringkat 3 : Bawaslu Kab. Tasikmalaya

B. Kreatifitas Kerjasama Terbaik diraih oleh :

- Peringkat 1 : Bawaslu Kab. Majalengka
- Peringkat 2 : Bawaslu Kab. Bandung
- Peringkat 3 : Bawaslu Kab. Bekasi

C. Keaktifan Pojok Pengawasan Terbaik diraih oleh :

- Peringkat 1 : Bawaslu Kota Banjar
- Peringkat 2 : Bawaslu Kab. Ciamis
- Peringkat 3 : Bawaslu Kab. Cianjur

J. Konsolidasi Kader SKPP Dasar dan Menengah Tahun 2021

Bawaslu Provinsi Jawa Barat melaksanakan Konsolidasi Kader SKPP Dasar dan Menengah Tahun 2021 dilaksanakan secara daring pada tanggal 21 November 2021. Kegiatan Konsolidasi Kader SKPP Dasar dan Menengah ini bertujuan untuk merawat, mengelola, dan mengkonsolidasi pengetahuan, memperkuat keterampilan, dan jejaring kader dengan bawaslu untuk menjadi penggerak masyarakat dan terlibat dalam pengawasan di lingkungannya; menjalin kesinambungan dan komunikasi yang baik antara bawaslu kab/kota dengan kader SKPP yang tersebar di wilayah provinsi Jawa Barat; memetakan kegiatan tindak lanjut kader sesuai potensi kader, isu strategis, dan wilayah domisili.

Kegiatan konsolidasi tersebut dihadiri oleh partisipan yang terdiri dari Kader SKP Dasar dan Kader SKPP Menengah, Kepala Sekolah Bawaslu kab/kota. Webinar konsolidasi menghadirkan narasumber dari Bawaslu RI yakni Bapak Masykurudin Hafidz, webinar dibuka secara resmi oleh Kepala Sekolah Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Bapak Zaki Hilmi). Setelah pemaparan materi dari narasumber dilanjutkan dengan tanya jawab, pemaparan RTL (rencana tindak lanjut) Kader dimana RTL tersebut ditanggapi oleh Kepala Sekolah masing-masing Kab/Kota.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada Tahun 2021 di Jawa Barat tidak ada pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan namun bukan berarti Bawaslu Provinsi Jawa Barat tidak melaksanakan kegiatan pengawasan. Kegiatan yang dilaksanakan Bagian Pengawasan Pemilu yaitu kegiatan prioritas nasional dan kegiatan bukan prioritas nasional pada Tahun 2021 dirangkum sebagai berikut:

1. Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021
2. Pembinaan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021
3. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Dasar
4. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Menengah
5. Pencanangan Kampung Pengawasan Partisipatif
6. Sosialisasi Pendidikan Pengawasan di Lingkungan Akademik
7. Webinar Pojok Pengawasan
8. Podcast Pandangan Demokrasi Milenial (PANDEMI)
9. Tadarus Pengawasan Pemilu
10. Kerjasama Pengawasan Partisipatif
11. Optimalisasi dan Integrasi Hubungan Antar Lembaga
12. Konsolidasi Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Dasar dan Menengah Tahun 2021.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengawasan Pemilu merupakan upaya persiapan menyongsong Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Untuk memperkuat pengawasan dengan masyarakat sebagai ujung tombak dari terciptanya sistem pengawasan yang ada dilingkungannya sendiri demi terciptanya pemilu dan pemilihan yang berintegritas berkualitas dan bermartabat. Kegiatan-kegiatan diatas merupakan langkah konkrit dan komitmen Bawaslu Provinsi Jawa Barat khususnya Bagian Pengawasan Pemilu untuk terus bergerak memperluas jaringan kemitraan dan terus menanam literasi pengawasan yang nantinya pada 2024 berharap akan berbuah manis, karena sejatinya rancang bangun demokrasi menjadi tanggung jawab bersama.

B. Rekomendasi

Dalam pelaksanaan SKPP :

- Pendaftar dari organisasi pelajar dan mahasiswa dari kalangan minoritas sangat minim, sehingga sosialisasi pengumuman rekrutmen harus dilakukan lebih masif lagi dengan mendatangi kantong-kantong organisasi pelajar dan mahasiswa, seperti dari organisasi pelajar dan mahasiswa non muslim, serta organisasi kelompok minoritas lainnya.

Dalam Modul SKPP :

- a. Penyusun modul SKPP tingkat lanjut berbeda dengan penyusun modul SKPP tingkat dasar dan tingkat menengah, sehingga dimungkinkan materinya tidak berkesinambungan;
- b. Substansi materi SKPP tingkat lanjut hanya memperkaya gagasan demokrasi secara mendalam, tidak ada substansi yg dapat mengingatkan kembali kepada peserta sekaligus menajamkan kembali terkait peran dan fungsi pengawas pemilu;
- c. Bahasan pada modul SKPP tingkat lanjut ini sangat teoritik, tidak ada penajaman, sebagai saran untuk SKPP tingkat Lanjut ini targetnya adalah kader menjadi expert/memiliki keahlian khusus;
- d. Perlu ditekankan mengenai konsep kerelawanan pada peserta, karena kader pada dasarnya ialah seorang relawan;
- e. Reward and punishment pada peserta perlu diperjelas dan ditegaskan;
- f. Mengedepankan alumni SKPP tingkat nasional yang sudah berhasil menjalankan RTL perlu dipertimbangkan untuk menerangkan success story menjadi seorang kader SKPP. Alumni juga bisa menjadi salah satu Fasilitator;
- g. Modul dapat diperkaya dengan visualisasi menarik sehingga dapat mudah dicerna bagi yang membaca dan mempelajarinya;
- h. Tidak terdapat review materi yg telah diberikan pada SKPP tingkat dasar & SKPP tingkat menengah yang dapat menggambarkan secara utuh apa saja yang telah dipelajari oleh alumni dari masing-masing provinsi;
- i. Terdapat persyaratan peserta diutamakan mampu berbahasa Inggris dapat menjadi kendala bagi peserta yang pemahaman substansi materi di SKPP tingkat dasar dan SKPP tingkat menengah bagus, dengan keaktifan dan kedisiplinan yang juga bagus, tetapi tidak mampu berbahasa Inggris;
- j. Jika terdapat peserta dari kaum penyandang disabilitas maka agar diperhatikan kemampuan aksesibilitas dan perlengkapan pendukung bagi peserta tersebut.
- k. Penjadwalan kegiatan prioritas nasional yang berubah-ubah kerana tingginya level PPKM berdampak pada mundurnya penjadwalan kegiatan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- l. Belum menyentuh seluruh aspek, kegiatan pengawasa partisipatif di Jawa Barat belum begitu masif.

Dalam Perbaikan Pusdik:

- a. Kegiatan SKPP: perlu diadakan praktek lapangan ke komunitas di dalam rangkaian SKPP, perlu ada program khusus untuk mengawal RTL kader
- b. Dari sisi anggaran PN bisa lebih dirinci dan di buatkan standar yang sama untuk seluruh provinsi
- c. Agar Bawaslu RI menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretariat Bawaslu Provinsi untuk optimalisasi pelaksanaan pemilu partisipatif..

Rekomendasi kegiatan dan evaluasi pengawasan partisipatif lainnya:

- a. Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif tatap muka bersama kelompok buruh, pendidik dan kelompok profesi;
- b. Identifikasi kampung adat untuk sasaran sosialisasi pengawasan partisipatif anti politik uang;
- c. Program Bawaslu mengajar dengan terlebih dahulu membuka peninjauan kerjasama pengawasan dengan perguruan tinggi negeri dan swasta dengan memberi kesempatan Pimpinan Bawaslu Provinsi untuk mengajar kuliah pengawasan Pemilu di ruang kelas pada Fakultas Hukum dan Ilmu Politik.
- d. Menyediakan fasilitas aplikasi digital bagi masyarakat agar lebih mudah memperoleh informasi pengawasan pemilu;
- e. Melakukan riset internal terhadap evaluasi penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Partisipatif;

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Edaran/Instruksi Pengawasan
2. Saran Perbaikan
3. Surat Keputusan KPU/ Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan
4. Dokumentasi